

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI DINAS KOPERASI,
UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2023**



**DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 170 Purwakarta-41113

Website: <https://dkupp.purwakartakab.go.id>

Email: dinaskoperasiukmperdagin@gmail.com

Berdasarkan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 700.1.2.1/508/Inspt-Irban I/2024 tanggal 19 April 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut : Hasil Evaluasi dari dokumen tersebut dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “Kategori predikat” untuk memberikan gambaran tingkat Akuntabilitas kinerja instansi yang telah dicapai. Dari hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, maka diperoleh nilai 86,75 dengan kategori A (Memuaskan), adapun uraian berdasarkan komponen dapat dilihat pada table berikut ini :

NO	Komponen yang Dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi Tahun 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30	28,50
3	Pelaporan Kinerja	15	12,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	86,75
	Predikat		A-MEMUASKAN

Dari Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 ini, masih terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

1. Perencanaan Kinerja

- Pedoman teknis perencanaan kinerja berupa Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023. Akan tetapi, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian belum memiliki pedoman teknis perencanaan kinerja yang dibuat oleh OPD.
- Dokumen perencanaan kinerja berupa renstra 2018-2023 dan perubahan renstra 2018-2023, Renja 2023 dan Perubahan Renja 2023, serta Perjanjian Kinerja yang telah diformalkan. Akan tetapi, dokumen Renstra 2018-2023 tidak ditandatangani dan dicap.

2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti. Akan tetapi belum dilengkapi dengan bukti dokumentasi

Dari Hasil evaluasi tersebut, direkomendasikan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta agar melakukan perbaikan atas Akuntabilitas kinerjanya sebagai berikut :

1. Membuat pedoman teknis perencanaan kinerja
2. Memperhatikan kelengkapan formal dan waktu penetapan pada dokumen perencanaan kinerja agar sesuai dengan ketentuan berlaku
3. Melengkapi tindaklanjut rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bukti dokumentasi
4. Senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan dan meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Atas Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 700.1.2.1/654/Inspt-Irban I/2024 tanggal 21 Mei 2024, Dari Hasil evaluasi Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2024 ini, masih terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu

1. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta agar memerintahkan secara tertulis kepada PPK melakukan perhitungan TKDN para rencana belanja PDN dan mendokumentasikannya

Purwakarta, 13 Juni 2024

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA



DANI ABDURAHMAN, SH, MH
Pemuda Utama Muda
NIP. 19710713 199901 1 001

**KOMPILASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

Nomor dan Tanggal LHP	Rekomendasi		Tindak Lanjut
	1	2	
700.1.2.1/508/Inspt-Irban I/2024 tanggal 19 April 2024	Membuat pedoman teknis perencanaan kinerja	Memperhatikan kelengkapan formal dan waktu penetapan pada dokumen perencanaan kinerja agar sesuai dengan ketentuan berlaku	Telah disusun pedoman teknis perencanaan kinerja
	2		akan memperhatikan hal tersebut
	3	Melengkapi tindaklanjut rekomendasi atas hasil evaluasi akintabilitas kinerja internal dengan bukti dokumentasi	
	4	Senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan dan meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.	Telah dibuatkannya Surat Pernyataan Komitmen

700.1.2.1/654/Inspt-Irban I/2024 tanggal 21 Mei 2024	1	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta agar memerintahkan secara tertulis kepada PPK melakukan perhitungan TKDN para rencana belanja PDN dan mendokumentasikannya	Telah di susun Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Penyusun Perhitungan TKDN
---	---	---	--

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 000.7/590/Seleka/2024.

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA PADA DINAS KOPERASI, UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah pada tiap bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang baik sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.
- b. bahwa Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, mengacu pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 241 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Kinerja (performance) adalah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi.
2. Perencanaan kinerja adalah proses yang melibatkan pengidentifikasian tujuan, penentuan standar kinerja, pengembangan rencana tindakan, dan penentuan indikator evaluasi untuk mengarahkan dan mengelola kinerja individu, tim, atau organisasi secara efektif.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Keputusan ini meliputi

- a. Tata Cara Rencana Strategis
- b. Tata Cara Rencana Kerja
- c. Tata Cara Perubahan Rencana Strategis
- d. Tata Cara Perubahan Rencana Kerja

BAB II
TATA CARA PERENCANAAN KINERJA
Pasal 1

Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas:

- a. Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Renja Perangkat Daerah

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah
- (2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappelitbangda dan pemangku kepentingan

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan
 - d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.

Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renstra

Pasal 6

Persiapan, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah
Pasal 7

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD

Pasal 8

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Pasal 10

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Pasal 11

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah.

(satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 50

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 12 Juni 2024

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA



DANI ABDURHMAN, SH, MH
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19710713 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 170 Purwakarta-41113
Website: <https://dkupp.purwakartakab.go.id>
Email: dinaskoperasiukmperdagin@gmail.com

SURAT PERNYATAAN KOMTIMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANI ABDURAHMAN, SH, MH
NIP : 19710713 199901 1 001
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Purwakarta

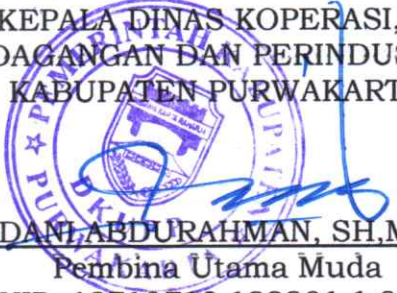
Dengan ini menyatakan akan komitmen dalam:

1. Meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja
2. Meningkatkan capaian kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan seluruh pemenuhan Komitmen tersebut di atas.

Purwakarta, 13 Juni 2024

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA


DANI ABDURAHMAN, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19710713 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 170 Purwakarta-41113

Website: <https://dkupp.purwakartakab.go.id>

Email: dinaskoperasiukmperdagin@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada : Pejabat Pembuat Komitmen
Dari : Kepala DKUPP
Nomor : 700 / 586 / Sekre / 2024.
Tanggal : 11 Juni 2023
Sifat : Sangat Penting
Perihal : Laporan Hasil Reviu P3DN

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu P3DN pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Nomor: 700.1.2.1/654/Inspt-Irban I Tanggal 21 Mei 2024 dimana terdapat temuan hasil reviu sebagai berikut:

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta agar memerintahkan secara tertulis kepada PPK untuk melakukan perhitungan TKDN pada rencana belanja PDN dan mendokumentasikannya dalam kertas kerja. Berdasarkan hal tersebut, Saudara agar melengkapi hasil reviu P3DN.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA


DANI ABDURAHMAN, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19710713 199901 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 000.7 / 591 / 58600 / 2024.

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN PERHITUNGAN TKDN PADA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tentang Tim Penyusun Perhitungan TKDN;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 241 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perhitungan TKDN Pada Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas untuk :
- Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan perhitungan TKDN;
 - Melakukan koordinasi di setiap penyusunan perhitungan TKDN;
 - Menyusun dokumen Perhitungan TKDN;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 13 Juni 2024 .

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA



DANI ABDURAHMAN, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19710713 199901 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 000.7/591/Sekera/2024.

TANGGAL : 13 Juni 2024.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERHITUNGAN TKDN PADA
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

No	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SEKRETARIS DINAS	Pejabat Pembuat Komtimen
2	KEPALA BIDANG KOPERASI	Pejabat Pembuat Komtimen
3	KEPALA BIDANG UKM	Pejabat Pembuat Komtimen
4	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN	Pejabat Pembuat Komtimen
5	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	Pejabat Pembuat Komtimen

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA


DANI ABDURAHMAN, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19710713 199901 1 001

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026





BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, disebutkan bahwa bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023, memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran

Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
36. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 - 2026;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 – 2026;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah;

10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD;
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
14. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD;
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Renstra PD ini untuk menyesuaikan kebijakan program dan target kinerja pembangunan perangkat daerah berdasarkan dokumen RPD, dan

menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah;

(2) Tujuan disusunnya Renstra PD ini untuk :

- a. Menetapkan arah pembangunan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- b. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal;
- c. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Perangkat Daerah;
- d. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program perangkat daerah;
- e. Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan perangkat daerah;
- f. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;
- g. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan perangkat daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra PD meliputi :

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan;

- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- h. BAB VIII Penutup.

- (2) Uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Hasil.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan RPD;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Renstra PD, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 13 April 2023



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 13 April 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 70



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani. No. 170 Telp (0264) Fax. 204038 Kode Pos 41113

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : TU.04/616/sekre/2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 menjadi pedoman Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menangani urusan koperasi dan UKM, urusan perdagangan dan urusan perindustrian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan merubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (LNRI tahun 2003 nomor 47, TLNRI 4286).

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Negara (LNRI tahun 2004 nomor 104, TLNRI nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005- 2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
26. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.
- KETIGA : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkedudukan dan berfungsi sebagai landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD yang telah ditetapkan
- KEEMPAT : Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta
- KELIMA : Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 13 April 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19630525 199012 2 001

KATA PENGANTAR

Setiap keberhasilan suatu program atau kegiatan diawali suatu Perencanaan yang matang, sehingga apa yang akan dilaksanakan sudah terencana dengan baik. Keberhasilan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sangat ditentukan oleh keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan semua pelaku pembangunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing - masing dengan dukungan berbagai stakeholder terkait.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta adalah merupakan arah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian dalam mempercepat pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada Visi dan Misi.

Kami mengucapkan terima kasih sedalam- dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, sehingga Penyusunan Rencana Strategis ini dapat terselesaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak. Demikian Rencana Strategis ini disusun untuk dilaksanakan.

Purwakarta, 13 April 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19630525 199012 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.2.1. Susunan Kepegawaian.....	13
2.2.2. Perlengkapan.....	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	46
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan.....	51
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program RPJPD 2020-2025.....	52
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Terkait di Provinsi Jawa Barat.....	54
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	62
3.5. Penetapan Isu-Isu Strategis.....	64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	66
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	67
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	68
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	87
BAB VIII PENUTUP.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu Perangkat Daerah yang menentukan strategi, dan arahan kebijakan yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026. Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan peluang, kekuatan, kelemahan dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2024 - 2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan koperasi, UKM, perdagangan dan perindustrian yang terjadi di Kabupaten Purwakarta. Rencana Strategis Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta diperoleh dari rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor ekonomi yang terkait dengan Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Alur proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta mengacu kepada

peraturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang telah disesuaikan dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Hal – hal pokok yang harus tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah diatur dalam pasal 13 ayat 1 dimana “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Oleh karena itu Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yang disusun ini juga akan menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta serta pemberdayaan koperasi,

UKM, perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Purwakarta yang telah diselaraskan dengan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, menyesuaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta serta pagu yang bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah yang telah disahkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

1.1.2. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan Renstra melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Dalam penyusunan tersebut rancangan Renstra sesuai amanat pasal 60 ayat (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) kepada BAPPEDA untuk di verifikasi, dan pada pasal 60 ayat (2) disebutkan "Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), "untuk memastikan kesesuaian rancangan awal renstra Perangkat Daerah dengan Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 57".

Dalam Proses penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Teknokratik;
- b. Partisipatif;
- c. Politis; dan
- d. Atas-bawah dan bawah-atas

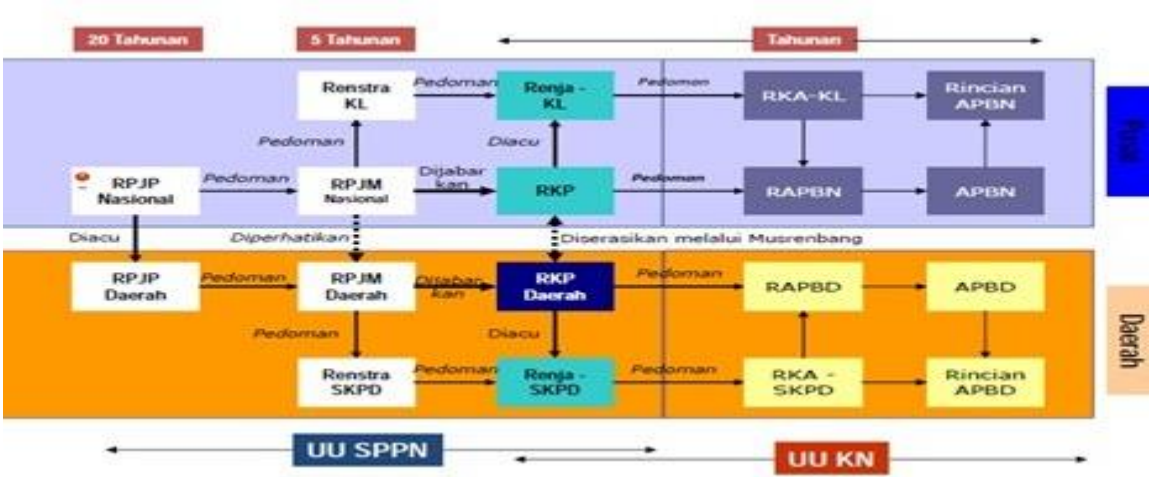
Perencanaan Daerah disusun berdasarkan data serta aturan yang mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan, pelayanan serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Selain berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, secara substansi Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta ini mengacu arah kebijakan RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026 dan juga mengacu Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Perindustrian RI untuk penyelenggaraan urusan pemerintah sektor koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian di wilayah Kabupaten Purwakarta serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan seperti dokumen RTRW dan hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan Kabupaten / Kota, Provinsi maupun Kementerian sehingga akan menjadi dokumen

perencanaan publik yang akuntabel, reliable, dan implementatif. Adapun gambaran tentang hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah ini

Gambar 2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Penganggaran



Sebagaimana tampil dalam Gambar 2 di atas Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dalam penyusunanannya harus mengacu kepada dokumen RKPd. Dimana kesemua perencanaan ini nantinya akan mengarah kepada penyusunan RAPBD untuk selanjutnya disahkan menjadi APBD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa

- Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
 - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
 - 11) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
 - 12) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9).
 - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2024 - 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 dan memberikan arah

(roadmap) untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yang mengakomodasi usulan masyarakat dan sebagai alat evaluasi kinerja Perangkat Daerah, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan renstra ini adalah sebagai pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi kabupaten, menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan PD, menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran PD dan menjadi pedoman pelaksanaan kerja bagi seluruh elemen di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta. Penyusunan renstra juga bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan dibidang pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, termasuk sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun sebagai instrument awal untuk digunakan pengukuran pencapaian kinerja dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten purwakarta Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana tersebut di atas, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

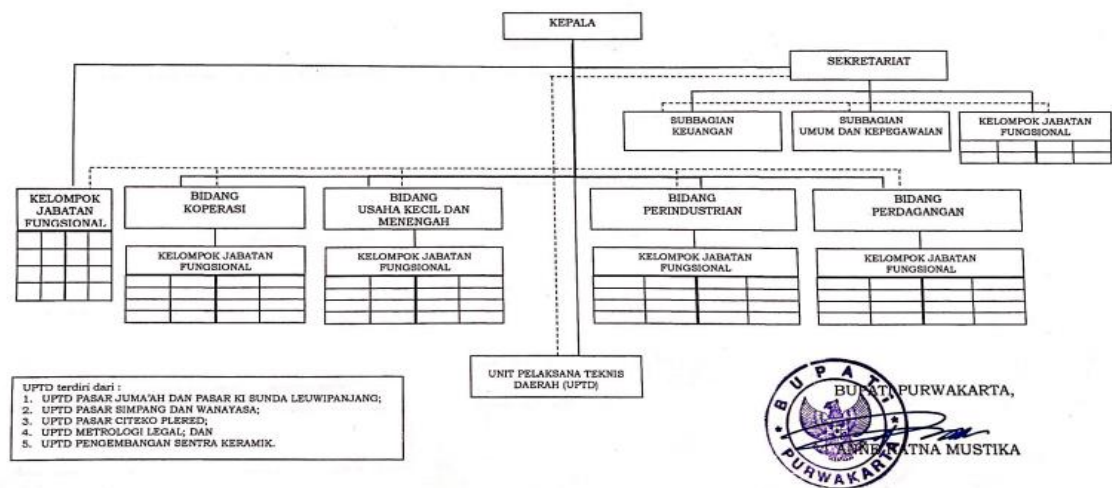
Sedangkan susunan organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekertaris, terdiri atas :
 - 1. Sub bagian keuangan
 - 2. Sub bagian Kepegawaian dan Umum
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Usaha Kecil Menengah dan Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Perdagangan dan Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Perindustrian dan Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri atas;
 - 1. UPTD Pasar Juma'ah dan Pasar Ki Sunda Leuwipanjang
 - 2. UPTD Pasar Simpang dan Pasar Wanayasa
 - 3. UPTD Pasar Citeko Plered;
 - 4. UPTD Metrologi Legal; dan
 - 5. UPTD Pengembangan Sentra Keramik;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dapat di lihat pada bagan struktur organisasi berikut ini :

Bagan Struktur Organisasi



2.2. Sumber Daya

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Koperasi ,Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta setelah di berlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi ,UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 127 orang, yang susunannya terinci sebagai berikut :

a. Status dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	46	29	75
2	CPNS	-	-	0
3	NON PNS	40	12	52
Jumlah				127

b. Golongan Ruang

No	Status Pegawai	Golongan Ruang																Jumlah
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	PNS	-	-	1	3	2	1	6	19	8	5	11	12	5	1	1	-	75
2	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	NON PNS	NON Golongan /Ruang																52
Jumlah																		127

c. Tingkat Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan								Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	S2	S3	
1	PNS	4	1	28	-	5	28	9	-	75
2	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	NON PNS	7	6	27	-	4	8	-	-	52
Jumlah										127

i. Jabatan/ Esselon

No	Status Pegawai	Jabatan / Esselon					Jumlah
		II	III	IV	Jafung	NS	
1	PNS	1	5	11	18	40	75
2	CPNS	-	-	-	-	-	0
3	NON PNS	-	-	-	-	-	52
Jumlah							127

2.1.2. Perlengkapan

Perlengkapan Yang dimiliki oleh Dinas Koperasi ,UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta rincian secara lengkap terlampir pada Lampiran 2 dan secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

a. Tanah dan Bangunan

- Bangunan Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta di Purwakarta berdiri pada sebidang tanah dengan luas tanah 1.768 m2 dan luas bangunan 139.71 m2
- UPTD Pengembangan Sentra Industri kramik dengan luas tanah 5.180 m2 dan luas bangunan 3.108 m2
- Kawasan Industri Di Desa Kopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dengan luas tanah 9.545 m2
- Bangunan Pasar Tradisional di Pasar Rebo, Pasar Leuwi Panjang dan Jumat, Pasar Citeko dan Pasar Wanayasa dan Simpang dengan luas tanah 48.381 M2 dan luas Bangunan 31.447 M2.

b. Kendaran :

- Kendaran Roda Empat, sebanyak 10 buah
- Kendaran roda dua, sebanyak 19 buah .

c. Perlengkapan lainnya :

- Seperangkat peralatan work-shop (alat bengkel)
- Seperangkat alat pemeliharaan.

- Seperangkat alat kantor.
- Seperangkat perlengkapan kantor (mesin tik,computer,laptop,dll)
- Seperangkat alat penyimpanan/arsip (lemari,filling cabinet,rak,brandkas,dll)
- Seperangkat alat kantor lainnya (deteksi uang palsu,white board,papan pengumuman,dll)
- Seperangkat alat pendingin ruangan kerja (AC,Kipas,dll)
- Seperangkat peralatan dapur.
- Seperangkat alat dapur.
- Seperangkat personal komputer.
- Seperangkat meja/kursi kerja dan alat-alat penunjangnya.
- Seperangkat lemari arsip dinamis.
- Seperangkat alat komunikasi.
- seperangkat alat jaringan (internet).
- Seperangkat alat-alat penunjang lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Dinas Koperasi ,UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta, menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi ,UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Koperasi ,UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.23 yaitu sebagai berikut:

TABEL T-C. 23

capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra Tahun					Realisasi Renstra Tahun					Rasio Capaian Renstra Tahun (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	B	B	B	B	BB	A	-	-	-	-	116		
2	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	-	-	80	80	80	-	-	90,57	-	-	-	-	113		
3	Jumlah Koperasi yang diawasi	-	-	150	150	150	-	-	150	-	-	-	-	100		
4	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	-	-	150	150	150	-	-	150	-	-	-	-	100		
5	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	-	-	150	150	150	-	-	150	-	-	-	-	100		
6	Jumlah Koperasi yang dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya	-	-	150	150	150	-	-	150	-	-	-	-	100		
7	Prosentase UMKM Yang Termonitoring dan Terevaluasi	-	-	60	60	60	-	-	60	-	-	-	-	100		
8	Terbinanya Pelaku UMKM Menjadi Wiraswasta Yang Profesional	-	-	30	30	30	-	-	30	-	-	-	-	100		

9	Jumlah UMKM yang teridentifikasi mengikuti sosialisasi dan pelatihan	-	-	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100		
10	Persentase UMKM yang terbina	-	-	60	60	60	-	-	60	-	-	-	-	100		
11	Jumlah Wirausaha baru yang dibentuk	-	-	30	30	30	-	-	30	-	-	-	-	100		
12	Terfasilitasinya UMKM Dalam Mengakses Kredit Perbankan dan Non Perbankan	-	-	50	50	50	-	-	30	-	-	-	-	60		
13	Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan Usaha Besar	-	-	10	10	10	-	-	25	-	-	-	-	250		
14	Terfasilitasinya UMKM Untuk Bermitra Dengan BUMN/BUMD	-	-	20	20	20	-	-	20	-	-	-	-	100		
15	Jumlah Pameran yang diikuti oleh UMKM	-	-	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	100		
16	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas bantuan	-	-	15	15	15	-	-	20	-	-	-	-	133		
17	Jumlah UMKM yang bermitra dengan perbankan, non perbankan dan lembaga lainnya	-	-	20	20	20	-	-	30	-	-	-	-	150		
18	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	-	-	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	100		
19	Terfasilitasinya rekomendasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	-	-	300	300	300	-	-	300	-	-	-	-	100		

20	Tersedianya sarana dan prasarana distribusi perdagangan di Kabupaten Purwakarta	-	-	3	3	3	-	-	3	-	-	-	-	100		
21	Terkendalinya harga kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar rakyat, pasar modern dan distributor	-	-	50	50	50	-	-	50	-	-	-	-	100		
22	Peningkatan nilai export di Kabupaten Purwakarta	-	-	80	80	80	-	-	80	-	-	-	-	100		
23	Terciptanya penggunaan produk dan pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	-	-	80	80	80	-	-	80	-	-	-	-	100		
24	Standarisasi produk dalam perlindungan konsumen	-	-	80	80	80	-	-	80	-	-	-	-	100		
25	Jumlah Pelatihan Potensi Unggulan	-	-	100	100	100	-	-	240	-	-	-	-	240		
26	Jumlah Desiminsasi	-	-	100	100	100	-	-	0	-	-	-	-	0		
27	Jumlah Pelatihan pengembangan desain kemasan	-	-	25	25	25	-	-	9	-	-	-	-	36		
28	Jumlah Perda	-	-	1	1	1	-	-	0	-	-	-	-	0		
29	Fasilitasi Penerbitan IUI Kecil dan Menengah	-	-	10	10	10	-	-	20	-	-	-	-	200		
30	Pemantauan dan Pengawasan Bagi IKM	-	-	30	30	30	-	-	60	-	-	-	-	200		
31	Pengembangan diverifikasi Produk IKM	-	-	5	5	5	-	-	4	-	-	-	-	80		

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra Tahun					Realisasi Renstra Tahun					Rasio Capaian Renstra Tahun (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2
1	Jumlah Pameran yang diikuti oleh Koperasi		5	-	-	-		0	-	-	-		0	-	-	-
2	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas bantuan		15	-	-	-		8	-	-	-		53	-	-	-
3	Jumlah Koperasi yang bermitra dengan perbankan, non perbankan dan lembaga lainnya		30	-	-	-		60	-	-	-		200	-	-	-
4	Jumlah Koperasi yang teridentifikasi mengikuti sosialisasi dan pelatihan		50	-	-	-		50	-	-	-		100	-	-	-
5	Laju peningkatan Koperasi Sehat		5	-	-	-		5	-	-	-		100	-	-	-
6	Laju peningkatan koperasi aktif		10	-	-	-		10	-	-	-		100	-	-	-
7	Laju peningkatan koperasi bersertifikat		15	-	-	-		15	-	-	-		100	-	-	-
8	Laju peningkatan Koperasi melakukan audit melalui akuntan publik		5	-	-	-		5	-	-	-		100	-	-	-
9	Laju Peningkatan Koperasi melaksanakan RAT		7	-	-	-		7	-	-	-		100	-	-	-

10	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Ekspor		2	-	-	-		0	-	-	-		0	-	-	-
11	Jumlah Pelayanan Ekspor		13.000	-	-	-		12.000	-	-	-		92	-	-	-
12	Jumlah P2WKSS terbina.		1	-	-	-		1	-	-	-		100	-	-	-
13	Jumlah Keikutsertaan dalam pameran kerajinan Daerah		2	-	-	-		2	-	-	-		100	-	-	-
14	Jumlah GKM Industri yang terbina		1	-	-	-		1	-	-	-		100	-	-	-
15	Jumlah lokasi Sarana/Prasarana promosi dan Penjualan Produk Industri Kecil		1	-	-	-		1	-	-	-		100	-	-	-
16	Jumlah desain kemasan produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)		5	-	-	-		5	-	-	-		100	-	-	-
17	Jumlah desain produk keramik yang standar/spesifik		20	-	-	-		20	-	-	-		100	-	-	-
18	Jumlah data potensi dan informasi industri		1	-	-	-		0	-	-	-		0	-	-	-
19	Jumlah pengrajin sentra industri keramik yang terbina		30	-	-	-		30	-	-	-		100	-	-	-
20	Jumlah pengunjung ke sentra industri keramik dan gerabah		8.000	-	-	-		1.645	-	-	-		20	-	-	-

21	Jumlah kerjasama kemitraan dengan industri hulu/lembaga keuangan		1	-	-	-		1	-	-	-		100	-	-	-
22	Jumlah pemanfaatan potensi sumberdaya IKM		10	-	-	-		40	-	-	-		300	-	-	-
23	Jumlah bahan baku yang standar produk IKM		1	-	-	-		1	-	-	-		100	-	-	-
24	Jumlah Pameran yang diikuti oleh UMKM		8	-	-	-		0	-	-	-		0	-	-	-
25	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas bantuan		20	-	-	-		100	-	-	-		300	-	-	-
26	Jumlah UMKM yang bermitra dengan perbankan, non perbankan dan lembaga lainnya		20	-	-	-		24	-	-	-		120	-	-	-
27	Jumlah UMKM yang teridentifikasi mengikuti sosialisasi dan pelatihan		25	-	-	-		0	-	-	-		0	-	-	-
28	Jumlah Pedagang yang mengikuti pembinaan		200	-	-	-		100	-	-	-		100	-	-	-
29	Jumlah Fasilitas pengaduan konsumen		150	-	-	-		0	-	-	-		0	-	-	-
30	Jumlah Pelayanan Kemetrolagian		1.500	-	-	-		1.463	-	-	-		97	-	-	-

31	Jumlah pengawasan Alat UTTP dan BDKT		10.000	-	-	-		100	-	-	-		10	-	-	-
32	Jumlah pengawasan dan pengendalian Harga kebutuhan pokok masyarakat		5	-	-	-		12	-	-	-		240	-	-	-
33	Persentase UMKM yang terbina		10	-	-	-		10	-	-	-		100	-	-	-
34	Jumlah Wirausaha baru yang di bentuk		50	-	-	-		30	-	-	-		60	-	-	-
35	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan		50	-	-	-		30	-	-	-		60	-	-	-
36	Jumlah Pasar Tradisional yang direvitalisasi		1	-	-	-		1	-	-	-		100	-	-	-
37	Persentase Capaian target Retribusi Pasar		100	-	-	-		77	-	-	-		77	-	-	-
38	Jumlah Pengunjung Pasar Tradisional		200	-	-	-		219.000	-	-	-		200	-	-	-
39	Tertatanya Pedagang Kaki Lima dan Asongan		1	-	-	-		2	-	-	-		200	-	-	-

Indikator yang tertuang dalam Tabel T-C.23 itu merupakan indikator utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (Tabel T-C.23), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam Tabel T-C. 24 yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Purwakarta

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)-				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pengembangan Usaha UMKM	950.000.000,00	-	-	-		399.302.400,00	-	-	-	-	42,03%	-	-	-	-
Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Pelaku Usaha UMKM	50.000.000,00	-	-	-		49.078.000,00	-	-	-	-	98,16%	-	-	-	-
Identifikasi Pelaku UMKM Setiap Jenis Usaha UMKM Kabupaten Purwakarta	65.000.000,00	-	-	-		49.080.000,00	-	-	-	-	75,51%	-	-	-	-
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	250.000.000,00	-	-	-		223.332.800,00	-	-	-	-	89,33%	-	-	-	-
Pelatihan Pembukuan Sederhana Bagi Pelaku UMKM	100.000.000,00	-	-	-		98.945.200,00	-	-	-	-	98,95%	-	-	-	-
Desain Engineering Detail (DED) Perencanaan Pembuatan Rumah Batik Kabupaten Purwakarta	50.000.000,00	-	-	-		44.425.000,00	-	-	-	-	88,85%	-	-	-	-
Desain Engineering Detail (DED) Revitalisasi Pembangunan Museum Keramik Modern	50.000.000,00	-	-	-		44.126.000,00	-	-	-	-	88,25%	-	-	-	-
Desain Engineering Detail (DED) Pembangunan Etalase Rumah Proses Keramik	50.000.000,00	-	-	-		43.456.000,00	-	-	-	-	86,91%	-	-	-	-
Penyelenggaraan Promosi dan Pameran Produk UMKM Purwakarta	350.000.000,00	-	-	-		326.718.880,00	-	-	-	-	93,35%	-	-	-	-
Study Pengembangan Desain Motif Batik Kabupaten Purwakarta	100.000.000,00	-	-	-		88.850.000,00	-	-	-	-	88,85%	-	-	-	-

Pengadaan Sarana Pendingin/AC Gedung Gallery Promosi UMKM	50.000.000,00	-	-	-		42.000.000,00	-	-	-	-	84,00%	-	-	-	-
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam	50.000.000,00	-	-	-		36.930.000,00	-	-	-	-	73,86%	-	-	-	-
Pengembangan Sistem Informasi dan Data Koperasi	80.000.000,00	-	-	-		77.030.000,00	-	-	-	-	96,29%	-	-	-	-
Penerapan Program Komputer Akuntansi Koperasi	140.000.000,00	-	-	-		137.124.414,00	-	-	-	-	97,95%	-	-	-	-
DAK Non Fisik Bidang Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK 2019)	380.000.000,00	-	-	-		334.462.200,00	-	-	-	-	88,02%	-	-	-	-
HARKOPNAS Tingkat Kabupaten	175.000.000,00	-	-	-		168.199.200,00	-	-	-	-	96,11%	-	-	-	-
Penataan Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif	50.000.000,00	-	-	-		46.630.000,00	-	-	-	-	93,26%	-	-	-	-
Peningkatan Audit Koperasi Bagi Pengawas Koperasi	50.000.000,00	-	-	-		43.687.400,00	-	-	-	-	87,37%	-	-	-	-
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	100.000.000,00	-	-	-		99.378.000,00	-	-	-	-	99,38%	-	-	-	-
Promosi Produk Unggulan Koperasi Kabupaten Purwakarta	200.000.000,00	-	-	-		187.580.000,00	-	-	-	-	93,79%	-	-	-	-
Monitoring dan Evaluasi Koperasi Yang Menerima Bantuan Dana Pemerintah	50.000.000,00	-	-	-		35.300.000,00	-	-	-	-	70,60%	-	-	-	-
Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	-	-	-		4.862.000,00	-	-	-	-	97,24%	-	-	-	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	175.000.000,00	-	-	-		158.798.017,00	-	-	-	-	90,74%	-	-	-	-
Penyediaan jasa kebersihan kantor	42.000.000,00	-	-	-		19.500.000,00	-	-	-	-	46,43%	-	-	-	-
Penyediaan alat tulis kantor	75.000.000,00	-	-	-		75.000.000,00	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	235.000.000,00	-	-	-		234.997.000,00	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35.000.000,00	-	-	-	35.000.000,00	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
Penyediaan peralatan rumah tangga	15.000.000,00	-	-	-	14.995.000,00	-	-	-	-	99,97%	-	-	-	-
Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000,00	-	-	-	30.640.000,00	-	-	-	-	61,28%	-	-	-	-
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	195.000.000,00	-	-	-	194.985.222,00	-	-	-	-	99,99%	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Tenaga PTT	464.400.000,00	-	-	-	318.555.000,00	-	-	-	-	68,59%	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)	491.400.000,00	-	-	-	402.090.000,00	-	-	-	-	81,83%	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	63.000.000,00	-	-	-	36.000.000,00	-	-	-	-	57,14%	-	-	-	-
Festival Purwakarta Istimewa	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor	35.000.000,00	-	-	-	35.000.000,00	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Bangunan Pasar Jum'at	50.000.000,00	-	-	-	49.968.000,00	-	-	-	-	99,94%	-	-	-	-
Penyediaan jasa jaminan Asuransi Bangunan Pasar Leuwipanjang	50.000.000,00	-	-	-	33.300.000,00	-	-	-	-	66,60%	-	-	-	-
Penyediaan jasa Jaminan Asuransi Bangunan Pasar Citeko Plered	50.000.000,00	-	-	-	49.968.000,00	-	-	-	-	99,94%	-	-	-	-
Penyediaan jasa Jaminan Asuransi Bangunan Pasar Wanayasa	50.000.000,00	-	-	-	24.999.300,00	-	-	-	-	50,00%	-	-	-	-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	150.000.000,00	-	-	-	131.774.000,00	-	-	-	-	87,85%	-	-	-	-
Pengadaan peralatan gedung kantor	150.000.000,00	-	-	-	138.210.000,00	-	-	-	-	92,14%	-	-	-	-
Pengadaan mebeleur	50.000.000,00	-	-	-	48.189.000,00	-	-	-	-	96,38%	-	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.000.000,00	-	-	-	69.596.800,00	-	-	-	-	92,80%	-	-	-	-

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15.000.000,00	-	-	-		0,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	-	-	-		13.400.000,00	-	-	-	-	89,33%	-	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	-	-	-		199.167.000,00	-	-	-	-	99,58%	-	-	-	-
Pembuatan DED Pembangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	-	-	-		98.000.000,00	-	-	-	-	98,00%	-	-	-	-
Pembangunan Gapura Kantor Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta	100.000.000,00	-	-	-		98.000.000,00	-	-	-	-	98,00%	-	-	-	-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.500.000,00	-	-	-		7.050.000,00	-	-	-	-	94,00%	-	-	-	-
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	7.500.000,00	-	-	-		7.500.000,00	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	25.000.000,00	-	-	-		23.577.500,00	-	-	-	-	94,31%	-	-	-	-
Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	7.500.000,00	-	-	-		7.500.000,00	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	7.500.000,00	-	-	-		7.500.000,00	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
Monitoring dan Evaluasi Potensi Pendapatan/Retribusi	7.500.000,00	-	-	-		6.800.000,00	-	-	-	-	90,67%	-	-	-	-
Perencanaan Penataan Ruang Perdagangan di Kabupaten Purwakarta	300.000.000,00	-	-	-		284.189.000,00	-	-	-	-	94,73%	-	-	-	-
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	200.000.000,00	-	-	-		126.320.000,00	-	-	-	-	63,16%	-	-	-	-
Pembinaan LPKSM Purwakarta	35.000.000,00	-	-	-		22.700.000,00	-	-	-	-	64,86%	-	-	-	-
Pengawasan Alat UTTP	35.000.000,00	-	-	-		23.620.000,00	-	-	-	-	67,49%	-	-	-	-
Sosialisasi Menjadi Konsumen Yang Cerdas	35.000.000,00	-	-	-		33.310.000,00	-	-	-	-	95,17%	-	-	-	-
Pengawasan Bahan Berbahaya dan Minuman Beralkohol	40.000.000,00	-	-	-		28.845.000,00	-	-	-	-	72,11%	-	-	-	-

Peringatan Hari Konsumen Nasional (HAKORNAS)	30.000.000,00	-	-	-		28.545.000,00	-	-	-	-	95,15%	-	-	-	-
Penilaian Kemetrologian	65.000.000,00	-	-	-		30.676.000,00	-	-	-	-	47,19%	-	-	-	-
Pengkalibrasian dan Tera Ulang Standar UTTP	25.000.000,00	-	-	-		21.591.800,00	-	-	-	-	86,37%	-	-	-	-
Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Purwakarta	70.000.000,00	-	-	-		58.522.500,00	-	-	-	-	83,60%	-	-	-	-
Pendataan Potensi UTTP	80.000.000,00	-	-	-		72.567.500,00	-	-	-	-	90,71%	-	-	-	-
Monitoring Harga Barang dan Jasa	70.000.000,00	-	-	-		48.670.000,00	-	-	-	-	69,53%	-	-	-	-
Pendataan Potensi Eksport	75.000.000,00	-	-	-		72.190.000,00	-	-	-	-	96,25%	-	-	-	-
Study Komparasi Pelaku dan Pengelola Pasar	75.000.000,00	-	-	-		74.000.000,00	-	-	-	-	98,67%	-	-	-	-
Pengadaan Alat Pengolah Sampah	75.000.000,00	-	-	-		73.955.000,00	-	-	-	-	98,61%	-	-	-	-
Pemeliharaan Bangunan Pasar	120.000.000	-	-	-		106.345.000,00	-	-	-	-	88,62%	-	-	-	-
Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal (DAK Fisik 2019)	1.500.000.000	-	-	-		1.189.980.000	-	-	-	-	79,33%	-	-	-	-
Penghijauan Pasar Tradisional	50.000.000,00	-	-	-		49.120.000,00	-	-	-	-	98,24%	-	-	-	-
Kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM)	80.000.000,00	-	-	-		29.350.000,00	-	-	-	-	36,69%	-	-	-	-
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Pasar	60.000.000,00	-	-	-		30.550.000,00	-	-	-	-	50,92%	-	-	-	-
Publikasi Informasi Perdagangan	85.000.000,00	-	-	-		80.774.050,00	-	-	-	-	95,03%	-	-	-	-
Pemeliharaan Pasar Jumaah	200.000.000	-	-	-		194.493.000,00	-	-	-	-	97,25%	-	-	-	-
Pemasangan Mekanikal Elektrikal Pasar Wanayasa (Lanjutan)	249.017.750	-	-	-		236.650.000,00	-	-	-	-	95,03%	-	-	-	-

Pembangunan Pasar Rakyat Wanayasa (Lanjutan)	1.000.000.000	-	-	-		969.817.700,00	-	-	-	-	96,98%	-	-	-	-
Peningkatan Sarana Pasar Ki Sunda Leuwipanjang	175.000.000	-	-	-		172.191.000,00	-	-	-	-	98,39%	-	-	-	-
Pembuatan DED Taman Pasar Rakyat Kabupaten Purwakarta	40.000.000,00	-	-	-		38.220.000,00	-	-	-	-	95,55%	-	-	-	-
Penyediaan Sarana Informasi Produk Sentra Industri	50.000.000,00	-	-	-		50.000.000,00	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	100.000.000	-	-	-		74.410.000,00	-	-	-	-	74,41%	-	-	-	-
Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Industri di Kabupaten Purwakarta (Banprov Tahun 2019)	300.000.000	-	-	-		297.928.750,00	-	-	-	-	99,31%	-	-	-	-
Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	75.000.000,00	-	-	-		75.000.000,00	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
Pengembangan Teknik Pengemasan Produksi Industri Kecil Menengah	75.000.000,00	-	-	-		75.000.000,00	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
Pengembangan Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	150.000.000	-	-	-		150.000.000,00	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
Peningkatan Peranan Wanita Industri Kecil Pedesaan (P2WIKP)	80.000.000,00	-	-	-		78.000.000,00	-	-	-	-	97,50%	-	-	-	-
Peningkatan Kinerja Kegiatan Dekranasda	300.000.000	-	-	-		299.800.000,00	-	-	-	-	99,93%	-	-	-	-
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Purwakarta	100.000.000	-	-	-		97.690.000,00	-	-	-	-	97,69%	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Pelaku IKM Olahan Pangan Kabupaten Purwakarta	100.000.000	-	-	-		88.550.000,00	-	-	-	-	88,55%	-	-	-	-
Penyediaan Sarana Untuk Pengembangan IKM	100.000.000	-	-	-		97.750.000,00	-	-	-	-	97,75%	-	-	-	-

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	75.000.000,00	-	-	-	-	75.000.000,00	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
Pemantauan dan Pengawasan Realisasi Produksi	50.000.000,00	-	-	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
Penyusunan Peta Potensi dan Profil IKM	75.000.000,00	-	-	-	-	75.000.000,00	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-
Diseminasi Standar Produk Industri	100.000.000	-	-	-	-	43.370.000,00	-	-	-	-	43,37%	-	-	-	-
Pengembangan Desain dan Kemasan Produk IKM	300.000.000	-	-	-	-	268.230.000,00	-	-	-	-	89,41%	-	-	-	-
Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri	300.000.000	-	-	-	-	287.500.000,00	-	-	-	-	95,83%	-	-	-	-
Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	-	3.596.518.000	-	-	-	-	3.293.150.457	-	-	-	-	91,56%	-	-	-
Penyediaan jasa surat menyurat	-	5.000.000	-	-	-	-	4.550.000	-	-	-	-	91,00%	-	-	-
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	246.128.000	-	-	-	-	205.524.763	-	-	-	-	83,50%	-	-	-
Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	17.800.000	-	-	-	-	17.580.782	-	-	-	-	98,77%	-	-	-
Penyediaan alat tulis kantor	-	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	100.000.000	-	-	-	-	97.450.000	-	-	-	-	97,45%	-	-	-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-
Penyediaan peralatan rumah tangga	-	15.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	80,00%	-	-	-

Penyediaan makanan dan minuman	-	35.000.000	-	-	-	-	30.791.000	-	-	-	-	87,97%	-	-	-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	60.000.000	-	-	-	-	59.933.504	-	-	-	-	99,89%	-	-	-
Penyedia jasa tenaga PTT	-	318.020.000	-	-	-	-	279.920.000	-	-	-	-	88,02%	-	-	-
Penyedia jasa tenaga piket malam	-	41.400.000	-	-	-	-	41.400.000	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-
Penyedia jasa tenaga harian lepas (THL)	-	731.520.000	-	-	-	-	716.045.000	-	-	-	-	97,88%	-	-	-
Penyediaan alat-alat kebersihan kantor	-	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-
Penyediaan jasa jaminan asuransi bangunan pasar jum'at	-	50.000.000	-	-	-	-	49.968.000	-	-	-	-	99,94%	-	-	-
Penyediaan jasa jaminan asuransi bangunan pasar leuwipanjang	-	50.000.000	-	-	-	-	33.300.000	-	-	-	-	66,60%	-	-	-
Penyediaan jasa jaminan asuransi bangunan pasar citeko plered	-	50.000.000	-	-	-	-	49.968.000	-	-	-	-	99,94%	-	-	-
Penyediaan jasa jaminan asuransi bangunan pasar wanayasa	-	50.000.000	-	-	-	-	24.999.300	-	-	-	-	50,00%	-	-	-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	60.000.000	-	-	-	-	45.550.000	-	-	-	-	75,92%	-	-	-
Pengadaan peralatan gedung kantor	-	50.000.000	-	-	-	-	46.724.000	-	-	-	-	93,45%	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	70.000.000	-	-	-	-	64.762.051	-	-	-	-	92,52%	-	-	-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	25.000.000	-	-	-	-	24.225.000	-	-	-	-	96,90%	-	-	-
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	100.000.000	-	-	-	-	99.742.500	-	-	-	-	99,74%	-	-	-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	10.000.000	-	-	-	-	5.650.000	-	-	-	-	56,50%	-	-	-
Penyusunan pelaporan barang milik daerah	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-

Penyusunan rencana kerja SKPD	-	10.000.000	-	-	-	-	5.338.000	-	-	-	-	53,38%	-	-	-
Pengadaan Desain Interior ruang kantor	-	50.000.000	-	-	-	-	49.774.000	-	-	-	-	99,55%	-	-	-
Penunjang Oprasional Kegiatan UPTD Pasar Jum'at dan Kisunda Leuwipanjang	-	50.000.000	-	-	-	-	48.750.000	-	-	-	-	97,50%	-	-	-
Penunjang Oprasional Kegiatan UPTD Pasar Simpang dan Wanayasa	-	50.000.000	-	-	-	-	49.997.000	-	-	-	-	99,99%	-	-	-
Penunjang Oprasional Kegiatan UPTD Pasar Citeko Plered	-	75.000.000	-	-	-	-	74.799.500	-	-	-	-	99,73%	-	-	-
Pengadaan Alat - Alat Kebersihan UPTD Pasar	-	50.000.000	-	-	-	-	49.600.000	-	-	-	-	99,20%	-	-	-
Penunjang Kegiatan UPTD Pengembangan Sentra Keramik	-	50.000.000	-	-	-	-	48.437.650	-	-	-	-	96,88%	-	-	-
Monitoring dan Evaluasi Potensi Pendataan/Retribusi	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
Branding Unit Pelaksanaan Teknis Daerah	-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-
Premi Asuransi Pegawai Non PNS	-	62.850.000	-	-	-	-	46.691.707	-	-	-	-	74,29%	-	-	-
Rehabilitasi Gedung dan Galeri UPTD Keramik	-	933.800.000	-	-	-	-	844.678.700	-	-	-	-	90,46%	-	-	-
Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-
Program Peningkatan Daya Saing Koperasi	-	25.000.000	-	-	-	-	23.068.000	-	-	-	-	92,27%	-	-	-
Penerapan Program Komputer Akutansi Koperasi	-	25.000.000	-	-	-	-	23.068.000	-	-	-	-	92,27%	-	-	-
Program penguatan Kelembagaan Koperasi	-	817.358.000	-	-	-	-	762.717.750	-	-	-	-	93,32%	-	-	-
Penertiban dan pengawasan lembaga koperasi	-	50.000.000	-	-	-	-	49.223.000	-	-	-	-	98,45%	-	-	-
Peningkatan kualitas dan Kesehatan KSP/USP	-	50.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00%	-	-	-

Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK NON FISIK TAHUN 2020)	-	417.358.000	-	-	-	-	413.799.750	-	-	-	-	99,15%	-	-	-
Pelatihan Perkoperasian bagi Pengelola dan Anggota Koperasi (DID-III)	-	300.000.000	-	-	-	-	299.695.000	-	-	-	-	99,90%	-	-	-
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	-	1.300.000.000					1.091.500.000					83,96%			
Peningkatan peranan wanita industri kecil pedesaan (P2WIKP)	-	50.000.000	-	-	-	-	49.750.000	-	-	-	-	99,50%	-	-	-
Penjunjang Kegiatan Dekranasda	-	200.000.000	-	-	-	-	199.650.000	-	-	-	-	99,83%	-	-	-
Pengadaan Kemasan Produk IKM	-	200.000.000	-	-	-	-	189.150.000	-	-	-	-	94,58%	-	-	-
Pengembangan sistem inovasi teknik produksi (DID-III)	-	200.000.000	-	-	-	-	107.700.000	-	-	-	-	53,85%	-	-	-
Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya (DID-III)	-	200.000.000	-	-	-	-	120.000.000	-	-	-	-	60,00%	-	-	-
Pelatihan Pengembangan Teknik Pengemasan Produk Industri Kecil dan Menengah (DID-III)	-	150.000.000	-	-	-	-	149.300.000	-	-	-	-	99,53%	-	-	-
Peningkatan Promosi Produk Unggulan Daerah (DID-III)	-	300.000.000	-	-	-	-	275.950.000	-	-	-	-	91,98%	-	-	-
Program Pengembangan Teknologi dan kebijakan Industri	-	750.000.000	-	-	-	-	653.880.000	-	-	-	-	87,18%	-	-	-
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Berbasis Teknologi IKM (DID-III)	-	400.000.000	-	-	-	-	386.000.000	-	-	-	-	96,50%	-	-	-
Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi (DID-III)	-	350.000.000	-	-	-	-	267.880.000	-	-	-	-	76,54%	-	-	-
Program peningkatan Daya saing UMKM	-	2.525.000.000	-	-	-	-	2.323.293.450	-	-	-	-	92,01%	-	-	-
Pengembangan usaha UMKM	-	125.000.000	-	-	-	-	123.990.000	-	-	-	-	99,19%	-	-	-

Pembangunan Rumah Batik dan sarana penunjangnya.	-	1.500.000.000	-	-	-	-	1.390.215.000	-	-	-	-	92,68%	-	-	-
Pengembangan dan promosi produksi batik kabupaten Purwakarta	-	75.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
Penyusunan direktori usaha UMKM	-	50.000.000	-	-	-	-	46.003.450	-	-	-	-	92,01%	-	-	-
Pelatihan dan Sisialisasi Sistem Aplikasi Pelaporan UMKM	-	50.000.000	-	-	-	-	49.280.000	-	-	-	-	98,56%	-	-	-
Pembuatan Warung Online UMKM Purwakarta	-	150.000.000	-	-	-	-	149.660.000	-	-	-	-	99,77%	-	-	-
Pelatihan Pembuatan Gerabah	-	75.000.000	-	-	-	-	74.735.000	-	-	-	-	99,65%	-	-	-
Penataan Pusat Jajanan Rakyat	-	150.000.000	-	-	-	-	149.850.000	-	-	-	-	99,90%	-	-	-
Pengadaan Gerobak Bagi Pelaku Usaha Kecil (DID-III)	-	350.000.000	-	-	-	-	339.560.000	-	-	-	-	97,02%	-	-	-
Program Peningkatan Perlindungan konsumen		480.000.000					421.262.141					87,76%			
Peningkatan Pengawasan Barang dan Jasa	-	30.000.000	-	-	-	-	19.216.800	-	-	-	-	64,06%	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Unit Metrologi Legal (UML)	-	200.000.000	-	-	-	-	183.075.000	-	-	-	-	91,54%	-	-	-
Penunjang Operasional Kemetrologian	-	75.000.000	-	-	-	-	73.936.299	-	-	-	-	98,58%	-	-	-
Pengkalibrasian dan Tera Ulang Standar Alat Ukur Timbang Takar dan Perlengkapan Lainnya (UTTP)	-	35.000.000	-	-	-	-	32.256.242	-	-	-	-	92,16%	-	-	-
Evaluasi Kemetrologian Tahap II	-	40.000.000	-	-	-	-	34.987.800	-	-	-	-	87,47%	-	-	-
Pengawasan Alat ukur, Timbang Takar dan Perlengkapan Lainnya (UTTP)	-	50.000.000	-	-	-	-	27.790.000	-	-	-	-	55,58%	-	-	-
Pembentukan Tenaga Reparatur UTTP	-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	-	2.475.000.000	-	-	-	-	2.135.366.544	-	-	-	-	86,28%	-	-	-

Monitoring Harga Barang dan Jasa	-	50.000.000	-	-	-	-	36.345.550	-	-	-	-	72,69%	-	-	-
Operasi Pasar Murah (OPM)	-	100.000.000	-	-	-	-	99.635.000	-	-	-	-	99,64%	-	-	-
Rehabilitasi Pasar Citeko	-	750.000.000	-	-	-	-	671.319.250	-	-	-	-	89,51%	-	-	-
Rehabilitasi Pasar Wanayasa	-	350.000.000	-	-	-	-	310.488.000	-	-	-	-	88,71%	-	-	-
Rehabilitasi Pasar Leuwipanjang	-	600.000.000	-	-	-	-	524.514.100	-	-	-	-	87,42%	-	-	-
Penataan Pasar Kuliner Maranggi	-	100.000.000	-	-	-	-	97.700.000	-	-	-	-	97,70%	-	-	-
Sewa Lahan Implasemen Stasiun Kereta Api Plered Untuk Pedagang Wisata	-	125.000.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
Penataan Lingkungan Pasar Kuliner Maranggi	-	300.000.000	-	-	-	-	296.380.000	-	-	-	-	98,79%	-	-	-
Pembuatan Kios Semi Permanen Pasar Wanayasa (DID-III)	-	100.000.000	-	-	-	-	98.984.644	-	-	-	-	98,98%	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	13.966.528.468	14.458.894.595	15.092.426.140	-	-	13.216.141.514	12.808.001.448	-	-	-	94,63%	88,58%	0,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	67.238.260	129.781.850	142.461.700	-	-	65.196.146	129.567.600	-	-	-	96,96%	99,83%	0,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	9.952.263	61.489.350	61.417.500	-	-	9.852.319	61.275.350	-	-	-	99,00%	99,65%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	9.884.141	10.073.600	9.481.700	-	-	9.384.141	10.073.600	-	-	-	94,94%	100,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	9.574.170	9.416.200	9.240.000	-	-	8.132.000	9.415.950	-	-	-	84,94%	100,00%	0,00%

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	9.082.440	9.392.700	9.368.100	-	-	9.082.440	9.392.700	-	-	-	100,00%	100,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	8.756.242	9.792.700	9.177.900	-	-	8.756.242	9.792.700	-	-	-	100,00%	100,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	9.993.743	9.898.500	13.928.500	-	-	9.993.743	9.898.500	-	-	-	100,00%	100,00%	0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	9.995.261	19.718.800	29.848.000	-	-	9.995.261	19.718.800	-	-	-	100,00%	100,00%	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	10.613.212.758	10.757.283.756	10.795.095.376	-	-	10.011.694.950	9.303.102.127	-	-	-	94,33%	86,48%	0,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	10.594.696.651	10.743.144.256	10.782.925.676	-	-	9.993.178.935	9.288.962.627	-	-	-	94,32%	86,46%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	9.999.773	8.739.500	7.142.800	-	-	9.999.773	8.739.500	-	-	-	100,00%	100,00%	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	8.516.334	5.400.000	5.026.900	-	-	8.516.242	5.400.000	-	-	-	100,00%	100,00%	0,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	16.761.824	9.639.750	10.558.000	-	-	10.711.742	9.639.750	-	-	-	63,91%	100,00%	0,00%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	8.321.692	4.239.750	5.467.200	-	-	5.471.692	4.239.750	-	-	-	65,75%	100,00%	0,00%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	8.440.132	5.400.000	5.090.800	-	-	5.240.050	5.400.000	-	-	-	62,08%	100,00%	0,00%
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	0	100.000.000	100.205.800	-	-	0	95.238.000	-	-	-	0,00%	95,24%	0,00%
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	0	0	100.205.800	-	-	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	0	100.000.000	0	-	-	0	95.238.000	-	-	-	0,00%	95,24%	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	29.977.682	115.007.550	78.000.000	-	-	29.788.268	115.007.550	-	-	-	99,37%	100,00%	0,00%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	20.000.000	60.666.350	0	-	-	20.000.000	60.666.350	-	-	-	100,00%	100,00%	0,00%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0	49.400.000	78.000.000	-	-	0	49.400.000	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	9.977.682	4.941.200	0	-	-	9.788.268	4.941.200	-	-	-	98,10%	100,00%	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	0	0	114.990.000			0	0	-			0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	754.359.916	468.067.704	1.521.880.700	-	-	751.836.895	467.576.864	-	-	-	99,67%	99,90%	0,00 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	34.985.168	29.986.150	33.175.700	-	-	34.982.278	29.986.150	-	-	-	99,99%	100,00%	0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	199.235.615	50.000.000	159.525.000	-	-	197.000.000	49.748.850	-	-	-	98,88%	99,50%	0,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	46.836.946	29.994.100	35.034.000	-	-	46.744.644	29.994.100	-	-	-	99,80%	100,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	262.164.809	199.999.254	905.887.500	-	-	262.144.809	199.999.254	-	-	-	99,99%	100,00%	0,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	111.480.232	49.988.200	149.829.700	-	-	111.480.000	49.988.150	-	-	-	100,00%	100,00%	0,00%
Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	17.000.000	27.000.000	15.000.000	-	-	17.000.000	26.940.000	-	-	-	100,00%	99,78%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	52.866.000	66.600.000	173.448.800	-	-	52.694.018	66.423.360	-	-	-	99,67%	99,73%	0,00%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	29.791.146	14.500.000	49.980.000	-	-	29.791.146	14.497.000	-	-	-	100,00%	99,98%	0,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	354.017.628	744.012.510	180.000.000	-	-	347.610.087	740.688.400	-	-	-	98,19%	99,55%	0,00%
Pengadaan Mebel	-	-	187.750.363	49.012.510	180.000.000	-	-	181.510.000	46.918.400	-	-	-	96,68%	95,73%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	77.918.462	0	0	-	-	77.800.000	0	-	-	-	99,85%	0,00%	0,00%

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	88.348.803	695.000.000	0	-	-	88.300.087	693.770.000	-	-	-	99,94%	99,82%	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.472.808.400	1.657.831.175	1.699.874.564	-	-	1.399.657.199	1.481.810.193	-	-	-	95,03%	89,38%	0,00 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	4.998.000	2.500.000	2.000.000	-	-	4.953.000	2.500.000	-	-	-	99,10%	100,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	243.352.400	306.743.475	286.600.116	-	-	174.477.181	257.809.599	-	-	-	71,70%	84,05%	0,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	1.224.458.000	1.348.587.700	1.411.274.448	-	-	1.220.227.018	1221500594	-	-	-	99,65%	90,58%	0,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	658.152.000	477.270.300	564.350.000	-	-	599.646.227	465.370.964	-	-	-	91,11%	97,51%	0,00 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	50.000.000	70.000.000	85.000.000	-	-	49.998.927	67.987.301	-	-	-	100,00%	97,12%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	50.000.000	20.000.000	34.000.000	-	-	32.071.300	19.884.763	-	-	-	64,14%	99,42%	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	30.020.000	30.812.400	18.250.000	-	-	30.020.000	30.790.000	-	-	-	100,00%	99,93%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	450.000.000	170.000.000	427.100.000	-	-	409.976.000	160.271.000	-	-	-	91,11%	94,28%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	78.132.000	186.457.900	0	-	-	77.580.000	186.437.900	-	-	-	99,29%	99,99%	0,00%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-	0	49.999.550	100.000.000	-	-	0	95.195.100	0	-	-	0,00%	190,39%	0,00 %

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	0	49.999.550	100.000.000	-	-	0	47.597.550	0	-	-	0,00%	95,20%	0,00 %
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	49.999.550	100.000.000	-	-	0	47.597.550	0	-	-	0,00%	95,20%	0,00%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	75.047.444	100.000.000	150.000.000	-	-	74.849.941	99.500.000	0	-	-	99,74%	99,50%	0,00%
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	75.047.444	100.000.000	150.000.000	-	-	74.849.941	99.500.000	0	-	-	99,74%	99,50%	0,00%
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	0	50.000.000	-	-	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	75.047.444	100.000.000	100.000.000	-	-	74.849.941	99.500.000	0	-	-	99,74%	99,50%	0,00%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	390.303.821	404.200.000	471.370.000	-	-	389.308.685	401.750.000	0	-	-	99,75%	99,39%	0,00 %
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	390.303.821	294.200.000	471.370.000	-	-	389.308.685	291.900.000	0	-	-	99,75%	99,22%	0,00 %
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	-	-	390.303.821	294.200.000	471.370.000	-	-	389.308.685	291.900.000	0	-	-	99,75%	99,22%	0,00%
Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	110.000.000	0	-	-	0	109.850.000	0	-	-	0,00%	99,86%	0,00 %
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	-	-	0	110.000.000	0	-	-	0	109.850.000	0	-	-	0,00%	99,86%	0,00%

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	250.169.256	449.991.750		-	-	211.307.931	448.131.750	0	-	-	84,47%	99,59%	0,00%
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	250.169.256	449.991.750	184.999.000	-	-	211.307.931	448.131.750	0	-	-	84,47%	99,59%	0,00%
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	-	-	150.204.907	249.998.900	0	-	-	136.744.108	248.773.900	0	-	-	91,04%	99,51%	0,00%
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	-	-	0	49.999.750	110.000.000	-	-	0	49.939.750	0	-	-	0,00%	99,88%	0,00%
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	-	-	99.964.349	49.997.300	74.999.000	-	-	74.563.823	49.797.300	0	-	-	74,59%	99,60%	0,00%
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	-	-	0	49.998.750	0	-	-	0	49.773.750	0	-	-	0,00%	99,55%	0,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	-	-	0	49.997.050	0	-	-	0	49.847.050	0	-	-	0,00%	99,70%	0,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	406.100.000	49.997.900	928.827.200	-	-	380.945.900	49.872.900	0	-	-	93,81%	99,75%	0,00 %
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	406.100.000	49.997.900	928.827.200	-	-	380.945.900	49.872.900	0	-	-	93,81%	99,75%	0,00%
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	-	-	406.100.000	49.997.900	928.827.200	-	-	380.945.900	49.872.900	0	-	-	93,81%	99,75%	0,00%
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	-	23.523.823	54.978.000	99.924.100	-	-	23.523.823	46.434.850	0	-	-	100,00%	84,46%	0,00%

Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-	0	9.998.900	74.924.100	-	-	0	7.448.900	0	-	-	0%	74,50%	0,00%
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	0	9.998.900	74.924.100	-	-	0	7.448.900	0	-	-	0%	74,50%	0,00%
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-	14.701.176	14.990.800	25.000.000	-	-	14.701.176	10.640.800	0	-	-	100,00 %	70,98%	0,00%
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-	14.701.176	14.990.800	25.000.000	-	-	14.701.176	10.640.800	0	-	-	100,00%	70,98%	0,00%
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	8.822.647	29.988.300	0	-	-	8.822.647	28.345.150	0	-	-	100,00 %	94,52%	0,00 %
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	-	-	0	14.990.000	0	-	-	0	14.684.800	0	-	-	0,00%	97,96%	0,00%
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-	-	8.822.647	14.998.300	0	-	-	8.822.647	13.660.350	0	-	-	100,00%	91,08%	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	0	14.999.650	50.000.000	-	-	0	14.999.650	0	-	-	0,00%	100,00 %	0,00 %
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	0	0	50.000.000	-	-	0	0	0					0,00 %
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	0	0	50.000.000	-	-	0	0	0					0,00 %
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-	-	0	14.999.650	0	-	-	0	14.999.650	0	-	-	0,00%	100,00%	0,00%

Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	0	14.999.650	0	-	-	0	14.999.650	0	-	-	0,00%	100,00%	0,00%
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	181.099.363	329.954.250	279.999.900	-	-	117.331.863	320.161.850	0	-	-	64,79%	97,03%	0,00 %
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	74.945.013	100.000.000	50.000.000	-	-	20.609.513	95.526.600	0	-	-	27,50%	95,53%	0,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	74.945.013	50.000.000	25.000.000	-	-	20.609.513	46.375.800	0	-	-	27,50%	92,75%	0,00%
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	0	50.000.000	25.000.000	-	-	0	49.150.800	0	-	-	0,00%	98,30%	0,00%
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	106.154.350	214.956.400	195.000.000	-	-	96.722.350	210.217.400	0	-	-	91,11%	97,80%	0,00 %
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	-	0	14.998.300	20.000.000	-	-	0	13.478.300	0	-	-	0,00%	89,87%	0,00%
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	-	106.154.350	199.958.100	175.000.000	-	-	96.722.350	196.739.100	0	-	-	91,11%	98,39%	0,00%
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	14.997.850	34.999.900	-	-	0	14.417.850	0	-	-	0,00%	96,13%	0,00%
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-	-	0	14.997.850	34.999.900	-	-	0	14.417.850	0	-	-	0,00%	96,13%	0,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	0	100.000.000		-	-	0	99.670.000	0	-	-	0,00%	99,67%	0,00%

Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	100.000.000	170.000.000	-	-	0	99.670.000	0	-	-	0,00%	99,67%	0,00%
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	-	-	0	50.000.000	50.000.000	-	-	0	49.850.000	0	-	-	0,00%	99,70%	0,00%
Pameran Dagang Nasional	-	-	0	0	120.000.000	-	-	0	0	0					0,00%
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	-	-	0	50.000.000	0	-	-	0	49.820.000	0	-	-	0,00%	99,64%	0,00%
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	679.849.684	299.999.100	217.953.800	-	-	625.747.628	290.281.170	0	-	-	92,04%	96,76%	0,00 %
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	679.849.684	299.999.100	217.953.800	-	-	625.747.628	290.281.170	0	-	-	92,04%	96,76%	0,00%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	-	-	520.000.000	199.999.650	167.967.500	-	-	483.521.993	198.278.120	0	-	-	92,98%	99,14%	0,00%
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	-	-	159.849.684	99.999.450	49.986.300	-	-	142.225.635	92.003.050	0	-	-	88,97%	92,00%	0,00%
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-	0	50.000.000	100.000.000	-	-	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	0	50.000.000	100.000.000	-	-	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			0	0	100.000.000	-	-	0	0	0			0,00%	0,00%	0,00%
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	-	-	0	50.000.000	0	-	-	0	0	0	-	-	0,00%	0,00%	0,00%

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	1.943.507.44 7	1.440.000.000	300.000.000	-	-	1.163.370.130	1.427.808.250	0	-	-	59,86%	99,15%	0,00%
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	1.943.507.44 7	1.440.000.000	300.000.000	-	-	1.163.370.130	1.427.808.250	0	-	-	59,86%	99,15%	0,00%
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	0	150.000.000	50.000.000	-	-	0	149.122.650	0	-	-	0,00%	99,42%	0,00%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	-	1.425.238.447	150.000.000	100.000.000	-	-	913.870.130	149.885.000	0	-	-	64,12%	99,92%	0,00%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	-	100.000.000	1.050.000.000	50.000.000	-	-	100.000.000	1.038.900.600	0	-	-	100,00%	98,94%	0,00%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	-	418.269.000	90.000.000	100.000.000	-	-	149.500.000	89.900.000	0	-	-	35,74%	99,89%	0,00%
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	-	-	0	29.998.800	50.000.000	-	-	0	29.998.800	0	-	-	0%	100,00 %	0,00 %
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	29.998.800	50.000.000	-	-	0	29.998.800	0	-	-	0%	100,00%	0,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	0	29.998.800	50.000.000	-	-	0	29.998.800	0	-	-	0%	100,00%	0,00%

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	49.999.985	29.999.300	150.000.000	-	-	49.999.985	29.999.300	0	-	-	100,00%	100,00%	0,00%
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	49.999.985	29.999.300	150.000.000	-	-	49.999.985	29.999.300	0	-	-	100,00%	100,00 %	0,00 %
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-	49.999.985	0	50.000.000	-	-	49.999.985	0	0	-	-	100,00%	0,00%	0,00%
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	-	-	0	29.999.300	100.000.000	-	-	0	29.999.300	0	-	-	0,00%	100,00%	0,00%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian.

Untuk tercapainya tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta yang dituangkan melalui Program dan kegiatan dilakukan melalui indentifikasi faktor Internal dan Faktor Ekternal dianalisis melalui analisis SWOT. Rencana Strategis adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi.

Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta harus menganalisa empat faktor yaitu kekuatan (Stengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) yang dihadapi melalui sektor Koperasi, UKM, perdagangan dan industri. Untuk menganalisa keempat faktor tersebut dibutuhkan Analisa SWOT.

Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Stengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Dan Analisa SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta untuk tiga tahun kedepan. Dan hal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sektor koperasi, UKM, perdagangan dan industri Kabupaten Purwakarta.

2.4.1. Analisa SWOT Sektor Koperasi dan UKM

Analisa kekuatan (Strengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) Sektor Koperasi dan UKM Kabupaten Purwakarta antara lain:

A. Kekuatan

1. Adanya dukungan kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UKM Dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Jumlah Koperasi dan UKM yang terus berkembang
3. Adanya semangat dan komitmen untuk membangun masyarakat.

B. Kelemahan

1. Belum tersedianya data valid dan akurat
2. Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)
3. Belum tersedianya Gedung Balai Latihan Koperasi dan Pusat Promosi KUMKM
4. Sebagian besar UKM bersifat non formal dan berskala Mikro, Diversifikasi produknya masih terbatas.

C. Peluang

1. Pasar dalam dan luar negeri terbuka bagi produk Koperasi Dan Usaha Kecil dan menengah
2. Tersedianya akses Informasi dan teknologi
3. Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu Destinasi wisata

D. Tantangan

1. Persaingan yang semakin ketat bagi Pelaku Usaha (UKM) dan Koperasi.
2. Produk Koperasi dan UMKM, sebagian belum memenuhi Standar mutu baik Nasional maupun Internasional.

3. Kondisi ekonomi yang fluktuatif
4. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
5. Rendahnya kapasitas SDM KUMKM

2.4.2. Analisa SWOT Sektor Perdagangan

Analisa kekuatan (Strengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) Sektor Perdagangan Kabupaten Purwakarta antara lain:

A. Kekuatan

1. Pemerintah Kabupaten Purwakarta konsisten mengembangkan UMKM yang berasal dari sektor perdagangan.

B. Kelemahan

1. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha.
2. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.
3. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.
4. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk.

C. Peluang

1. Terbukanya pasar luar negeri Kawasan Asean (MEA) dan Pasar Global.
2. Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan pasar tradisional dan toko modern.

D. Tantangan

1. Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean dan Pasar Global

2. Beredarnya produk-produk impor yang belum memiliki standar.
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang antimonopoli dan persaingan tidak sehat.
4. Banyaknya produk sejenis dari daerah lain.
5. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar

2.4.3. Analisa SWOT Sektor Perindustrian

Analisa kekuatan (Strengths), peluang (Opportunities), kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats) Sektor Industri Kabupaten Purwakarta antara lain:

A. Kekuatan

1. Besarnya potensi industri skala rumah tangga dan kecil.
2. Telah terbentuknya organisasi usaha IKM berdasarkan komoditi.
3. Adanya event-event promosi dan temu usaha bagi IKM dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
4. Pemerintah Kabupaten Purwakarta konsisten mengembangkan UKM, termasuk UKM yang berasal dari sektor industri.

B. Kelemahan

1. Rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha, penguasaan teknologi produksi, orientasi pada mutu serta daya inovasi serta kegiatan usaha industri yang berbasis sumber daya lokal.
2. Masih terbatasnya kemampuan mengakses pasar serta institusi pemasaran di Kabupaten Purwakarta.
3. Belum terwujudnya komitmen, konsistensi kebijakan dan keterpaduan berbagai pihak dalam pengembangan IKM.

4. Kurangnya jumlah tenaga ahli dibidang industri karena terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknis fungsional.
5. Struktur industri belum tertata secara baik.
6. Belum tersedianya database industri kabupaten Purwakarta.

C. Peluang

1. Terbukanya kerjasama dengan perguruan tinggi, Lembaga desain, Konsultan, Badan Riset dan Balai Pengujian.
2. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan industri didaerah termasuk Kabupaten Purwakarta.
3. Kabupaten Purwakarta sebagai bagian dari penyangga 2 WPPI Jawa-Bali.
4. Pemberlakuan SNI secara wajib.
5. Tersedianya potensi Agro dan Hasil Hutan
6. Terbukanya jalur pemasaran yang semakin beragam
7. Terbukanya penggunaan teknologi baru

D. Tantangan

1. Sebagian industri Kabupaten Purwakarta masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah.
2. Tingginya biaya faktor produksi produk IKM mengakibatkan kurangnya daya saing produk IKM.
3. Masih adanya kecendrungan masyarakat menyukai produk luar negeri.
4. Kekuatan inovasi produk-produk impor
5. Lemahnya penanganan HKI

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan

Walaupun perkembangan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian tersebut cukup memberikan peranan terhadap perkembangan pembangunan Kabupaten Purwakarta, namun masih dapat beberapa permasalahan yang perlu segera diantisipasi pada pelaksanaan pelayanan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil menengah, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun-tahun berikutnya. Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Purwakarta seiring dengan dinamika dan pengembangan Kabupaten sebagai berikut:

1. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
 - a. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi, sehingga masih banyak koperasi yang tidak aktif;
 - b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membangun dan menjadi anggota koperasi sehingga masih banyak masyarakat yang terjerat oleh rentenir yang mengatasnamakan koperasi atau bank keliling;
 - c. Terbatasnya SDM fungsional pengawas koperasi sehingga kurang optimal dalam melaksanakan pembinaan ke seluruh koperasi yang terdapat di Kabupaten Purwakarta;
 - d. Rendahnya daya saing UKM;
 - e. Masih rendahnya persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri;
 - f. Masih rendahnya persentase OVOP yang berkembang;

- g. Terbatasnya kompetensi SDM UMKM, sehingga produk yang dihasilkan kurang inovatif dan kurang berkualitas sesuai permintaan pasar;
2. Bidang Perdagangan
- a. Masih rendahnya serapan resi Gudang;
 - b. Masih rendahnya pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat;
 - c. Masih ditemukannya kasus peredaran barang rusak/kadarluarsa, dan produk makanan dengan bahan berbahaya;
3. Bidang Perindustrian
- a. Industri kecil belum optimal dalam memanfaatkan e-commerce;
 - b. Masih rendahnya usaha peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi;
 - c. Masih rendahnya pelaksanaan pembinaan terhadap sentra industry;
 - d. Beberapa produk industri yang dihasilkan kurang memiliki ciri khas/karakter yang membedakan dengan produk dari daerah lain;
 - e. Dalam penerbitan perijinan usaha industri terjadi ego sektoral antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten;

3.2. Telaahan Visi, Misi RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2020-2025

3.2.1.Visi dan Misi

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta isu strategis aktual. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, Visi dan Misi pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 yaitu : **“PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:, yaitu;

Kesatu
Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berkhlakul Karimah

Kedua
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup

Ketiga
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal

Keempat
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan

Kelima
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Dengan memperhatikan penjabaran misi Rencana Pembangunan Daerah di atas, maka Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan misi ketiga yaitu **“Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal”**.

dimana tujuan misi ke tiga tersebut yang berkaitan dengan sasaran Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian adalah:

- Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
- Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Terkait di Provinsi Jawa Barat

Telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level nasional, provinsi dan kabupaten. Dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar melakukan telaahan terhadap rencana startegis 3 kementerian yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

1. Kementerian Koperasi Dan UKM

Dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 terdapat tujuh agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin pemerataan;
3. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

6. Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian pada Tahun 2020-2024 yang mencakup, Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang dilaksanakan dengan strategi :

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi;
4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan
5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan, UMKM dan koperasi termasuk sentra Industri Kecil Menengah (IKM) diarahkan: sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) dan Terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur. Selain itu, RPJMN Tahun 2020-2024 juga mengarahkan koperasi untuk mendukung pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, melalui revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan peningkatan etos kerja serta kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong.

Dengan memperhatikan arah kebijakan di tingkat pusat tersebut, maka ini sejalan dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun ke depan. Keduanya menitikberatkan pengembangan Koperasi dan UKM pada aspek produksi, pembiayaan, kelembagaan, dan pemasaran serta peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UKM.

2. Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 yaitu: “Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;

2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi serta dari tujuan yang telah dirumuskan maka Sasaran Strategi yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa , dengan indikator:
 - Neraca perdagangan;
 - Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa;
 - Pertumbuhan ekspor barang non migas; - Rasio ekspor jasa terhadap PDB; dan
 - PTA/FTA/CEPA yang disepakati
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok, dengan indikator inflasi pangan bergejolak (volatile food)
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab, dengan indikator Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN).
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri , dengan indikator:
 - Pertumbuhan Subsektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor; dan
 - Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK, dengan indikator:

- Pertumbuhan nilai transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK);
 - Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan; dan
 - Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK)
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional, dengan indikator:
- Indeks Reformasi Birokrasi;
 - Unit kerja pelayanan publik yang mendapatkan predikat “Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”
 - Nilai Hasil Evaluasi SAKIP;
 - Opini BPK terhadap Laporan Keuangan; dan
 - Tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan, dengan indikator Indeks Profesionalisme SDM Perdagangan Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan di atas, tujuan dan beserta indikator yang bisa ditetapkan pada sektor Perdagangan antara lain:
- Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok
 - Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab
 - Meningkatnya pasar produk dalam negeri

3. Kementerian Perindustrian

Sebagai amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015

tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035.

RIPIN 2015 -2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, memuat antara lain tentang visi, misi, dan strategi pembangunan industri.

Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh. Industri tangguh bercirikan :

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan.
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional.
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional.
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau.
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja.
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam.
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi.
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri.
4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI).
5. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan sentra Industri Kecil dan industri menengah.
6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah.
7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri.
8. Melakukan pembangunan industri hijau.
9. Melakukan pembangunan industri strategis.
10. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan
11. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

1. Dinas Koperasi dan UMKM

Berpijak pada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kebijakan, Program dan Janji Gubernur pada Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dilaksanakan selama periode tahun 2018-2023, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu merumuskan kebijakan operasional dibidang perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah, maka ditetapkan Visi dengan variabel kunci "meningkatkan daya beli masyarakat" yaitu: "***Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi***"

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dilakukan upaya sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat yang sekaligus mencerminkan value organisasi, melalui misi sebagai berikut :

1. Membentuk Manusia Pancasila yang bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban
2. Melahirkan Manusia Yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Pemetaan Daerah.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kalaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kaloratif, antara Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Daerah

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 berupaya mendorong dan mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat 2005-2025 tahap ketiga, yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat di bidang ekonomi, utamanya bidang industri dan perdagangan.

Sesuai dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025 visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023, dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Jawa Barat, maka Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu terkait dengan misi :

1. Membentuk Manusia Pancasila yang bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban
2. Melahirkan Manusia Yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Pemetaan Daerah.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kalaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kaloratif, antara Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Daerah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan, potensi dan permasalahan serta isu strategis wilayahnya maka penataan

ruang wilayah Kabupaten Purwakarta bertujuan mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pengembangan industri, pertanian, dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai langkah pencapaian tujuan, yaitu:

- a. Pengembangan kegiatan industri secara teraglomerasi terutama di bagian utara wilayah kabupaten dan sekitar pintu tol (interchange);
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian yang terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan atau minapolitan di bagian selatan wilayah kabupaten;
- c. Pengembangan kawasan wisata yang bersinergi dengan kegiatan pertanian dan industri;
- d. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah yang terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
- e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.4.2.Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana,

dan/atau Program. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penyusunan KLHS juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pelaksanaan program yang tertuang dalam Rencana Pembanguna Daerah (RPD Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah

daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyelenggaraan urusan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
2. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
3. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal.
4. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat.
5. Belum digalakkanya kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi.
6. Masih rendahnya pembinaan IKM Belum meningkatnya produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke Tahun			Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Pertumbuhan Ekonomi	3,2	3,1	3,01	9.31
		Persentase Koperasi Aktif	89,7	89,8	90,05	269.55
		Pertumbuhan UMKM	81,52	85,09	88,67	39.71
	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Inflasi	1,34	1,25	1,16	3.75
		Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB	81,52	85,09	88,67	255.28
		Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	46.782.449.072	47.737.192.933	48.711.421.360	143.231.063.365
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2024 – 2026 sesuai dengan misi Kabupaten Purwakarta disajikan sebagai berikut :

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"		
Misi	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Memperkuat Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Koperasi Meningkatkan Pembinaan, Pengelolaan, Pengembangan dan Inovasi UMKM yang Berbasis Digital	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dan Usaha Perdagangan dan Perindustrian	Mengembangkan Pertumbuhan Nilai Usaha Perdagangan dan Industri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Reformasi Birokrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. PROGRAM

Program pembangunan yang merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dengan misi Kabupaten Purwakarta yaitu: **Misi “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal”**, dengan program pembangunan sebagai berikut:

TABEL T-C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Tujuan renstra	Sasaran renstra	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi awal		Target kinerja			Pagu anggaran			Kondisi akhir		Ket
							2021	2022	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat																	
					Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,42	3,42	3,2	3,1	3,01				9,31		
					Inflasi	Persen	1,81	1,58	1,34	1,25	1,16				3,75		
					Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB	Rp.	70,79	74,36	81,52	85,09	88,67				255,28		
	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah											1.150.000.000	1.215.000.000	1.365.000.000		3.730.000.000	
					Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,42	3,42	3,2	3,1	3,01				9,31		
					Persentase Koperasi Aktif	Persen	89,65		89,7	89,8	90,05				269,55		
					Pertumbuhan UMKM	Persen	1		11,86	13,16	14,69				39,71		
		Program : Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam										50.000.000	52.500.000	60.000.000		162.500.000	
					Persentase ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi yang diterbitkan	Persen	0	0	87,5	90	91,67				269,17		
			Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									50.000.000	52.500.000	60.000.000			
					Jumlah ijin usaha koperasi simpan pinjam kewenangan kabupaten yang diterbitkan	Unit Usaha	0	0	35	45	55						

				Subkegiatan : Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								50.000.000	52.500.000	60.000.000				
					Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	0	0	35	45	55				135			
		Program : Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi										185.000.000	195.000.000	222.500.000		602.500.000		
					Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan	Persen	89.65		89,7	89,8	90,05				269,55			
			Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								185.000.000	195.000.000	222.500.000					
					Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	Unit Usaha	412		505	506	507							
				Subkegiatan : Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								185.000.000	195.000.000	222.500.000				
					Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	412		505	506	507				1.518			
		Program : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi										290.000.000	307.500.000	345.000.000		942.500.000		
					Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	89,65		89,7	89,8	90,25				269,75			
					Persentase Koperasi yang mendapatkan penghargaan hasil penilaian	Persen	10	10	12	15	18				45			
			Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								290.000.000	307.500.000	345.000.000					
					Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang dinilai kesehatannya	Unit Usaha	412		505	506	507				1.518			
				Subkegiatan : Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								170.000.000	180.000.000	205.000.000				

					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	412		505	506	507				1.518		
				Subkegiatan : Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								120.000.000	127.500.000	140.000.000			
					Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	10	10	12	15	18				45		
		Program : Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian										100.000.000	102.500.000	105.000.000		307.500.000	
					Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian	Persen	69,90	71,66	72,82	73,71	74,6				221,13		
			Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									50.000.000	52.500.000	55.000.000			
					Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Unit Usaha	150	150	150	160	170				480		
				Subkegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi								50.000.000	52.500.000	55.000.000			
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	150	150	150	160	170				480		
			Kegiatan : Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota									50.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Jumlah UKM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Unit Usaha	100	100	150	160	170				480		
				Subkegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM								50.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM	Orang	100	100	150	160	170				480		
		Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)										375.000.000	382.500.000	432.500.000		1.190.000.000	
					Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	47,85		85,23	92,24	100				277,47		
					Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha	Persen	55,06		56,46	56,93	57,39				170,78		
					Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha	Persen	53		75,23	86,45	100				261,68		
					Tingkat Wirausaha Baru (WUB)	Persen	1		2,53	2,78	3,85				9,16		
					Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan	Persen	52,2		57,9	60,42	63,22				181,54		
			Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan									375.000.000	382.500.000	432.500.000			

					Jumlah UKM yang difasilitasi dalam pemberdayaan	Unit Usaha	150		775	830	920				2.525		
				Subkegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								75.000.000	82.500.000	82.500.000			
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	0		25	30	40				95		
				Subkegiatan : Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro								100.000.000	100.000.000	125.000.000			
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	0		50	50	50				150		
				Subkegiatan : Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro								125.000.000	115.000.000	135.000.000			
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	150		700	750	830				2.280		
				Subkegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								75.000.000	85.000.000	90.000.000			
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	0		25	30	40				95		
		Program : Pengembangan UMKM										150.000.000	175.000.000	200.000.000		525.000.000	
					Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	10		20,56	24,3	28,04				72,9		
					Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya	Persen	6,82		9,63	10,56	11,5				31,69		
			Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil									150.000.000	175.000.000	200.000.000			
					Jumlah Usaha Mikro dengan peningkatan menjadi Usaha Kecil	Unit Usaha	200		535	1070	1605				3.210		
				Subkegiatan : Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi								150.000.000	175.000.000	200.000.000			
					Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	200		535	1070	1605				3.210		
	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Perindustrian																

					Inflasi	Persen	1,81	1,58	1,34	1,25	1,16				3,75		
					Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB	Rp.	70,79	74,36	81,52	85,09	88,67				255,28		
					Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	Rp.											
		Program : Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan										110.000.000	120.000.000	120.000.000		350.000.000	
					Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	93		95,32	96,53	97,86				289,71		
					Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	Persen	100		100	100	100				300		
		Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan										15.000.000	20.000.000	20.000.000			
					Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Dokumen	1	1	1	1	1				3		
		Subkegiatan : Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										15.000.000	20.000.000	20.000.000			
					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	1	1	1	1				3		
		Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang										15.000.000	15.000.000	15.000.000			
					Jumlah penerbitan TDG	Dokumen	1	1	1	1	1				3		
		Subkegiatan : Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang										15.000.000	15.000.000	15.000.000			
					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	1	1	1	1	1				3		
		Kegiatan : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri										30.000.000	30.000.000	30.000.000			

					Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Dokumen	0	0	1	1	1				3		
				Subkegiatan : Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik								15.000.000	15.000.000	15.000.000			
					Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0	0	1	1	1				3		
				Subkegiatan : Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri								15.000.000	15.000.000	15.000.000			
					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dokumen	0	0	1	1	1				3		
			Kegiatan : Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri									30.000.000	30.000.000	30.000.000			
					Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Dokumen	0	0	1	1	1				3		
				Subkegiatan : Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri								15.000.000	15.000.000	15.000.000			
					Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Dokumen	0	0	1	1	1				3		
				Subkegiatan : Fasilitas Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri								15.000.000	15.000.000	15.000.000			
					Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Dokumen	0	0	1	1	1				3		

			Kegiatan : Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)									20.000.000	25.000.000	25.000.000				
					Jumlah penerbitan SKA	Dokumen	14.348		16.444	16.937	17.445				50.826			
				Subkegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA									20.000.000	25.000.000	25.000.000			
					Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	14.348		16.444	16.937	17.445				50.826			
		Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan											20.000.000	25.000.000	25.000.000		70.000.000	
					Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	Persen	100	100	100	100	100				300			
			Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya									20.000.000	25.000.000	25.000.000				
					Jumlah pengelola yang di bina	Orang	0	20	25	30	35				90			
				Subkegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									20.000.000	25.000.000	25.000.000			
		Program : Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting											295.000.000	330.000.000	345.000.000		970.000.000	
					Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya	Persen	100	100	100	100	100				300			
					Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	34,84		37	38	39				114			
			Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									30.000.000	45.000.000	55.000.000				
					Jumlah Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	Komoditi	42	42	42	42	42				126			
				Subkegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									15.000.000	25.000.000	30.000.000			
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	1	1	1	1				3			

				Subkegiatan : Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat							15.000.000	20.000.000	25.000.000				
					Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	1	1	1	1				3		
			Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							215.000.000	225.000.000	225.000.000					
					Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia dan harga	Komoditi	42	42	42	42	42				126		
			Subkegiatan : Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							15.000.000	25.000.000	25.000.000					
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	1				3		
				Subkegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							200.000.000	200.000.000	200.000.000				
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	1				3		
			Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							50.000.000	60.000.000	65.000.000					
					Jumlah dokumen Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	Dokumen	1	1	3	3	3				9		
			Subkegiatan : Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan							15.000.000	15.000.000	15.000.000					
					Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	0	0	1	1	1				3		
				Subkegiatan : Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi							15.000.000	25.000.000	25.000.000				

					Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	0	0	1	1	1				3		
				Subkegiatan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi								20.000.000	20.000.000	25.000.000			
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	1	1	1	1	1				3		
		Program : Pengembangan Ekspor										200.000.000	200.000.000	200.000.000		600.000.000	
					Tingkat Nilai Export bersih	Persen	2	2	1	1	1				3		
					Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	Persen	0	0	2	2,94	3,22				8,16		
			Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									200.000.000	200.000.000	200.000.000			
					Jumlah kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran	Produk	0	0	2	2	2				6		
				Subkegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota								50.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku Usaha	0	40	50	55	60				225		
				Subkegiatan : Pameran Dagang Nasional								100.000.000	100.000.000	100.000.000			
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	0	0	20	25	30				75		
				Subkegiatan : Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor								50.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	0	40	50	55	60				165		
		Program : Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen										275.000.000	350.000.000	375.000.000		1.000.000.000	
					Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	62,61		64,62	80	100				244,62		
			Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan									275.000.000	350.000.000	375.000.000			

					Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	Unit	2.348		21.000	26.000,	32.500				79.500		
				Subkegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang								200.000.000	250.000.000	275.000.000			
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	2.348		21.000	26.000,	32.500				79.500		
				Subkegiatan : Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal								75.000.000	100.000.000	100.000.000			
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	0		200	250	300				750		
		Program : Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri										75.000.000	75.000.000	135.000.000		285.000.000	
					Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Persen	0	0	50	60	70				180		
					Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	Persen	0	0	50	60	70				180		
			Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri									75.000.000	75.000.000	135.000.000			
					Jumlah Jenis produk UMKM yang di Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan di Kabupaten	Produk	0	0	20	30	40				90		
				Subkegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								50.000.000	50.000.000	85.000.000			
					Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	0	0	10	15	20				45		
				Subkegiatan : Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								25.000.000	25.000.000	50.000.000			

					Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	0	0	10	15	20				45		
		Program : Perencanaan Dan Pembangunan Industri										450.000.000	475.000.000	600.000.000		1.525.000.000	
					Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIP	Persen	0	0	60	80	100				240		
					Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	47,52		83,33	90,48	100				273,81		
			Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota										450.000.000	475.000.000	600.000.000		
					Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kegiatan	3		3	3	3				9		
				Subkegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri								150.000.000	150.000.000	100.000.000			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	1	1	1				3		
				Subkegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri								150.000.000	175.000.000	250.000.000			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1	1	1	1				3		
				Subkegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								150.000.000	150.000.000	250.000.000			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1				3		
		Program : Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota										50.000.000	75.000.000	100.000.000		225.000.000	
					Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Persen	18,68		20,71	21,19	21,45				63,35		

					Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100		100	100	100				300		
					Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100				300		
					Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100				300		
			Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota									50.000.000	75.000.000	100.000.000			
					Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1				3		
				Subkegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota								50.000.000	75.000.000	100.000.000			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1				3		
		Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional										150.000.000	150.000.000	75.000.000		375.000.000	
					Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	100	100	100	100	100				300		
					Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri yang dilaksanakan	Kegiatan	100	100	100	100	100				300		

			Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota									150.000.000	150.000.000	75.000.000			
					Jumlah dokumen informasi Industri untuk Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1				3		
				Subkegiatan : Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas									150.000.000	150.000.000	75.000.000		
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	1	1	1	1	1				3		
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel																	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A				A		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A				A		
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik				Baik		
		Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											14.155.277.95 ₄	14.153.268.21 ₄		42.462.753.28 ₈	
					Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	A	A	A	A						
			Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									172.366.396	173.437.230	171.427.490			
					Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	7	7	7						
				Subkegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									50.000.000	50.000.000	50.000.000		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4	4	4	4						

				Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD							15.000.000	15.000.000	15.000.000			
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKP	Dokumen	1	1	1	1	1					
				Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							15.000.000	15.000.000	15.000.000			
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1					
				Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							15.000.000	15.000.000	15.000.000			
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1					
				Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							15.000.000	15.000.000	15.000.000			
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1					
				Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							22.366.396	23.437.230	21.427.490			
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1					
				Subkegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							40.000.000	40.000.000	40.000.000			
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4					
			Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									10.802.925.67 6	10.802.925.67 6			
					Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen										
				Subkegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								10.782.925.67 6	10.782.925.67 6			

					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	12	12	12	12						
				Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								10.000.000	10.000.000	10.000.000			
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	1						
				Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								10.000.000	10.000.000	10.000.000			
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	4	4	4	4						
			Kegiatan :Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									20.000.000	20.000.000	20.000.000			
					Jumlah dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2						
				Subkegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								10.000.000	10.000.000	10.000.000			
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1						
				Subkegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								10.000.000	10.000.000	10.000.000			
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1						
			Kegiatan :Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									10.000.000	10.000.000	10.000.000			
					Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2						
				Subkegiatan : Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah								5.000.000	5.000.000	5.000.000			

					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1						
				Subkegiatan : Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah								5.000.000	5.000.000	5.000.000			
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1						
				Kegiatan :Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								80.000.000	80.000.000	80.000.000			
					Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	2	2	2						
				Subkegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								10.000.000	10.000.000	10.000.000			
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	1	1						
				Subkegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								20.000.000	20.000.000	20.000.000			
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0	1	1	1						
				Subkegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								50.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	5	5	5						
				Kegiatan :Administrasi Umum Perangkat Daerah								635.000.000	635.000.000	635.000.000			
					Jumlah Kegiatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Yang Diberikan	Kegiatan	8	8	8	8	8						
				Subkegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								50.000.000	50.000.000	50.000.000			
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1						
				Subkegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								100.000.000	100.000.000	100.000.000			
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1						
				Subkegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								50.000.000	50.000.000	50.000.000			

					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1						
				Subkegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor								200.000.000	200.000.000	200.000.000			
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	2	2	2						
				Subkegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								100.000.000	100.000.000	100.000.000			
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	2	2						
				Subkegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu								20.000.000	20.000.000	20.000.000			
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	1	1	1						
				Subkegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								100.000.000	100.000.000	100.000.000			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1	1						
				Subkegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								15.000.000	15.000.000	15.000.000			
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	2	2	2						
			Kegiatan :Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									350.000.000	350.000.000	350.000.000			
					Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	3		2	2	2						
				Subkegiatan : Pengadaan Mebel								100.000.000	100.000.000	100.000.000			
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1						
				Subkegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								250.000.000	250.000.000	250.000.000			
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	2	2						

			Kegiatan :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.603.915.048	1.603.915.048	1.603.915.048			
					Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang/Operasional Dinas Yang Dilaksanakan	Kegiatan	3	3	3	3	3					
				Subkegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat								5.000.000	5.000.000	5.000.000		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	1	1					
				Subkegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								250.000.000	250.000.000	250.000.000		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1					
				Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								1.348.915.048	1.348.915.048	1.348.915.048		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen	53	53	53	53	53					
			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								480.000.000	480.000.000	480.000.000			
					Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	5	5	4	4	4					
				Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								80.000.000	80.000.000	80.000.000		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	6	7	7	7					
				Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								50.000.000	50.000.000	50.000.000		
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	2	3	3	3					
				Subkegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								50.000.000	50.000.000	50.000.000		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	4	3	3	3					
				Subkegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								300.000.000	300.000.000	300.000.000		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	1	2	2	2					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

IKU Perangkat Daerah

NO	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,2	3,1	3,01	9.31
2	Persentase Koperasi Aktif	89,7	89,8	90,05	269.55
3	Pertumbuhan UMKM	11,86	13,16	14,69	39.71
4	Inflasi	1,34	1,25	1,16	3.75
5	Pendapatan Per Kapita / PDRB ADHB	81,52	85,09	88,67	255.28
6	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	46.782.449.072	47.737.192.933	48.711.421.360	143.231.063.365
7	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik

Sementara itu, IKK atau Indikator Kinerja Kunci terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang terdiri dari berbagai indikator. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel di bawah:

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026

NO	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2024	2025	2026	
1	Persentase ijin usaha simpan pinjan untuk koperasi yang diterbitkan	87,5	90	91,67	269.17
2	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang dilaksanakan	89,7	89,8	90,05	269.55
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	89,7	89,8	90,25	269.55
4	Persentase Koperasi yang mendapatkan penghargaan hasil penilaian	12	15	18	45
5	Persentase SDM yang memiliki sertifikat kompetensi perkoperasian	72,82	73,71	74,6	221.13
6	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	85,23	92,24	100	277.47
7	Persentase UMKM yang melakukan kemitraan usaha	56,46	56,93	57,39	170.78
8	Persentase UMKM yang sudah memiliki ijin usaha	75,23	86,45	100	261.68

9	Tingkat Wirausaha Baru (WUB)	2,53	2,78	3,85	9.16
10	Persentase pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan/sosialisasi kewirausahaan	57,9	60,42	63,22	181.54
11	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	20,56	24,3	28,04	72.9
12	Persentase UMKM yang terfasilitasi dalam pengembangan usahanya	9,63	10,56	11,5	31.69
13	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	95,32	96,53	97,86	289.71
14	Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan	100	100	100	300
15	Persentase Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	100	100	100	300
16	Persentase komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil harga dan stoknya	100	100	100	300
17	Persentase kinerja realisasi pupuk	37	38	39	114
18	Tingkat Nilai Export bersih	1	1	1	3
19	Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	2	2,94	3,22	8.16
20	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	64,62	80	100	244.62

21	Persentase UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50	50	50	150
22	Persentase Penggunaan Produk dan Pemasaran Unggulan Kabupaten Purwakarta	50	50	50	150
23	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	60	80	100	240
24	Cakupan bina kelompok pengrajin	83,33	90,48	100	273.81
25	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	20,71	21,19	21,45	63.35
26	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	300
27	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	300
28	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	100	100	100	300
29	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	100	100	300
30	Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri yang dilaksanakan	100	100	100	300
31	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan disertai kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini hendaknya dapat memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance*.

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 menjabarkan Enam Belas (16) program selama periode tiga tahun tersebut. Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan ekonomi khususnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra ini tidak terlepas dari peran serta seluruh *stakeholder* yang terkait. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi secara luas.

Hal-hal penting yang perlu digaris-bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 ini adalah:

1. Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, 2025 dan 2026
2. Renstra Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan;
3. Sangat diharapkan bahwa Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dapat memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan sehingga akan memberikan kontribusi, manfaat dan dampak positif bagi *stakeholder* secara khusus serta bagi masyarakat secara umum.

Demikian Renstra ini disusun sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan demi berlangsungnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan Kabupaten Purwakarta Istimewa.

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19630525 199012 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.10, Purwakarta

Purwakarta, 31 Maret 2023

Nomor : TU.04/565/Sekre/2023

Kepada

Lampiran : -

Yth. Kepala UPTD Dilingkungan

Perihal : **Evaluasi Kinerja Triwulan I**

DKUPP Kab. Purwakarta

di

Tempat

Dipermaklumkan, sehubungan dengan akan dilaksanakannya evaluasi kinerja triwulan I Tahun 2023, maka bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada kegiatan sebagaimana perihal diatas, yang akan dilaksanakan:

Hari, tanggal : Rabu, 05 April 2023

Pukul : 08.30 Wib s.d Selesai

Tempat : Aula Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

Catatan : 1. Data Toko, Kios dan Los Aktif dan tidak aktif
2. Data UTTP Hasil tera Triwulan I
3. Data Pelaku Usaha Keramik Triwulan I
4. Data realisasi PAD Triwulan I

Demikian kami agar maklum, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA,**



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM
Pembina Utama Muda / IV c



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikat oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 10 Telp. (0264) 204038 Fax 204038 Kode Pos 41114

DAFTAR HADIR

HARI : Rabu
TANGGAL : 5 APRIL 2023
JAM : 09.00 WIB
TEMPAT : Aula Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.			1.....	
2.	Handayani P.	Bendahara		2.....
3.	Lusiana M.	Kasir	3.....	
4.	Eri N	PAM		4.....
5.	Darwin	Plaksana	5.....	
6.	Asep			6.....
7.	Henri Ismawati	JFPP	7.....	
8.	HERMANDA	JFPP		8.....
9.	LEVI.	Angler	9.....	
10.	Egi	JFPP		10.....
11.	Suryani	AK	11.....	
12.	Nana V			12.....
13.	Shofi		13.....	
14.	Taufik A.	Plaksana		14.....

17.		17.....	
18.			18.....
19.		19.....	
20.			20.....
21.		21.....	
22.			22.....
23.		23.....	
24.			24.....
25.		25.....	
26.			26.....
27.		27.....	
28.			28.....
29.		29.....	
30.			30.....

PERENCANA AHLI MUDA



EVY NOPIYANI, SE, M.AP

NIP. 19801115 200701 2 008

DOKUMENTASI RAPAT TRIWULAN I





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

**NOTULEN RAPAT
EVALUASI CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TRIWULAN I**

Hari/ Tanggal : Rabu, 05 April 2023
Pukul : 09.00 Wib
Tempat : Aula Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Pemimpin Rapat : Kepala Dinas
Peserta Rapat :

1. Kepala Bidang Koperasi
2. Kepala Bidang UKM
3. Kepala Bidang Perdagangan
4. Kepala Bidang Perindustrian
5. Kasubbag
6. Pejabat Fungsional
7. 5 Kepala UPTD

1. Rapat dibuka oleh Kepala Dinas pukul 09.15 Wib. Agenda rapat pada kesempatan ini adalah Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan I, Adanya penekanan Kepala Dinas mengenai Tugas dan Fungsi masing-masing individu yang wajib di penuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Mohon diingat dan dilaksanakan betul sasaran dan indikator sasaran kinerja masing-masing pegawai karena akan

dievaluasi pimpinan sejauh mana target kinerja tersebut terealisasi.

Buat time schedule atas upaya pencapaian target yang ada.

2. Dalam hal evaluasi pelaksanaan rencana kerja triwulan I, realisasi Anggaran per 31 Maret 2023 sebesar 16,05 % dengan realisasi Kinerja Utama 48,64 %, Indikator Program 25,19 %, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan 43,55 %. Mohon kepada para Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional untuk meningkatkan kinerjanya kembali pada triwulan II kedepan. Segala permasalahan yang ada segera dikomunikasikan agar segera mendapatkan solusi dan tidak mengganggu kinerja baik individu maupun kinerja secara kelembagaan.
3. Untuk Pendapatan Asli Daerah yaitu 13 %

NOTULENSI



EVY NOPIYANI, SE

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
BIDANG KOPERASI DKUPP TRIWULAN I
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL MONITORING		HASIL EVALUASI	
							REALISASI	%		
1		3	4	5	6	7	8	9		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI										
1	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	150	50	33,33%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target triwulan	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150	50	33,33%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target triwulan	
				Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	10	0	0%	Akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN										
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian dan UKM	150	0	0%	Akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya	

KEPALA DINAS

DR. H. KARLATI JUANDA, MM
NIP. 19630528 199012 2 001

Purwakarta, April 2023

Dimonitoring Oleh :

1. Ketua Tim

EKA SUGRIYANA, SP. MM
NIP. 19700407 199803 1 008

2. Anggota

EVI NOPTIANI, SE, MAP
NIP. 19801115 200701 2 008

3. Anggota

SUPARNI, SE
NIP. 19770120 2007012 005

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
BIDANG UKM DRUPP TRIWULAN I
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50 UMKM	0 UMKM	Akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 UMKM	0 UMKM	Akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	300 Unit Usaha	0 Unit Usaha	Akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya

KEPALA DINAS

Dr. H. KARMATI JUANDA, MM
NIP. 196303-5 199012 2 001

Purwakarta, April 2023
Dimonitoring Oleh :

1. Ketua Tim
EKA SUGRIYANA, SE, MM
NIP. 19700407 199803 1 008

2. Anggota
EVI NOPTIANI, SE, MAP
NIP. 19801115 200701 2 008

3. Anggota
SUPARNI, SE
NIP. 19770120 2007012 005

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
BIDANG PERDAGANGAN DEKUPP TRIWULAN I
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALIASI	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen pemenuhan komitmen perolehan perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai dengan pengujian di OSS
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Data Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai dengan pengujian di OSS
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	0 Orang	akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	Sudah dilaksanakan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	0 Laporan	akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	0 Laporan	akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	0 Laporan	akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	0 Laporan	akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	50 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	30 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 UMKM	0 UMKM	akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya

KEPALA DINAS

Dra. Hj. KARENATI JUANDA, MM
NIP. 1963052 199012 2 001

Purwakarta, April 2023
Dimonitoring Oleh :

1. Ketua Tim
EKA SUGRIYANA, SP. MM
NIP. 19700407 199803 1 008

2. Anggota
EVI NOPIYANI, SE, M.AP
NIP. 19801115 200701 2 008

3. Anggota
SUPARNI, SE
NIP. 19770120 2007012 005

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
BIDANG PERINDUSTRIAN DRUPP TRIWULAN I
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas dan produktivitas IKM	Jumlah IKM produktif	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	0 Dokumen	Akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	0 Dokumen	Akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	0 Dokumen	Akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	1 Dokumen	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perijinan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perijinan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perijinan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perijinan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Sudah dilaksanakan
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	1 Dokumen	0 Dokumen	Akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINAS	Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten melalui SINAS	1 Dokumen	0 Dokumen	Akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya

KEPALA DINAS

Dra. H. KARMATI JUANDA, MM
NIP. 19630405 199012 2 001

Purwakarta, April 2023

Dimonitoring Oleh :

1. Ketua Tim

EKA SUGRIYANA, SP. MM

NIP. 19700407 199803 1 008

2. Anggota

EVI HOPTYANI, SE. M.AP

NIP. 19801115 200701 2 008

3. Anggota

SUPARTI, SE

NIP. 19770120 2007012 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170, Purwakarta

Purwakarta, 04 Juli 2023

Nomor	: PR.10/910/Sekre/2023	Kepada
Lampiran	: -	Yth. Para Kepala Bidang
Perihal	: Evaluasi Kinerja Triwulan II	dan Kepala UPTD DKUPP Kab. Purwakarta di Tempat

Dipermaklumkan, sehubungan dengan akan dilaksanakannya evaluasi kinerja triwulan II Tahun 2023, maka bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada:

Hari, tanggal	: Kamis, 06 Juli 2023
Pukul	: 08.30 Wib s.d Selesai
Tempat	: Ruang Kerja Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
Catatan	: Membawa Data Realisasi Fisik Triwulan II Tahun 2023

Demikian atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terimakasih.

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA,



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh
PLT. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA
PL. AGUS SURYAKURNIAHA, SH., M.Si
Pernyataan: 04/07/2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikat oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 10 Telp. (0264) 204038 Fax 204038 Kode Pos 41114

DAFTAR HADIR

HARI : Kamis
TANGGAL : 6 Juli 2023
JAM :
TEMPAT : Aula Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Plt. Kari	Plt. Kari	1.....
2.	MAKMER.W	Bid Industri	2.....
3.	Henri Ismawati.	JFPP	3.....
4.	Egi R		4.....
5.	LEVI.		5.....
6.	JEFF NIDOLE	JFPP	6.....
7.	ERI N	PAM.	7.....
8.	Asep W		8.....
9.	Darsim		9.....
10.	Suryani	OF AK	10.....
11.	Rini Larasati	Analisis Koe	11.....
12.	Lusana M	Kepes Koperasi	12.....
13.	X/ana Purnama	St. pp.	13.....
14.	Rienri k	JFPP	14.....

17.			17.....	
18.				18.....
19.			19.....	
20.				20.....
21.			21.....	
22.				22.....
23.			23.....	
24.				24.....
25.			25.....	
26.				26.....
27.			27.....	
28.				28.....
29.			29.....	
30.				30.....

PERENCANA AHLI MUDA



EVI NOPIYANI, SE, M.AP

NIP. 19801115 200701 2 008

DOKUMENTASI RAPAT TRIWULAN II





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

**NOTULEN RAPAT
EVALUASI CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TRIWULAN III**

Hari/ Tanggal : Kamis, 06 Juli 2023
Pukul : 09.00 Wib
Tempat : Aula Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Pemimpin Rapat : Kepala Dinas
Peserta Rapat :

1. Kepala Bidang Koperasi
2. Kepala Bidang UKM
3. Kepala Bidang Perdagangan
4. Kepala Bidang Perindustrian
5. Kasubbag
6. Pejabat Fungsional
7. 5 Kepala UPTD

1. Rapat dibuka oleh Kepala Dinas pukul 09.15 Wib. Agenda rapat pada kesempatan ini adalah Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan II, Adanya penekanan Kepala Dinas mengenai Tugas dan Fungsi masing-masing individu yang wajib di penuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Mohon diingat dan dilaksanakan betul sasaran dan indikator sasaran kinerja masing-masing pegawai karena akan

dievaluasi pimpinan sejauh mana target kinerja tersebut terealisasi.

Buat time schedule atas upaya pencapaian target yang ada.

2. Dalam hal evaluasi pelaksanaan rencana kerja triwulan II, realisasi Anggaran per 30 Juni 2023 sebesar 40,09 % dengan realisasi Kinerja Utama 66,98 %, Indikator Program 39,90 %, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan 58,28 %. Mohon kepada para Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional untuk meningkatkan kinerjanya kembali pada triwulan III kedepan. Segala permasalahan yang ada segera dikomunikasikan agar segera mendapatkan solusi dan tidak mengganggu kinerja baik individu maupun kinerja secara kelembagaan.
3. Untuk Pendapatan Asli Daerah yaitu 49 %

NOTULENSI


EVI NOPIYANI, SE

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
BIDANG KOPERASI DRUPP TRIWULAN II
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL MONITORING		HASIL EVALUASI
							REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemendirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemendirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150	75	50,00%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target triwulan
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150	80	53,33%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target triwulan
				Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	10	0	0%	Belum dilaksanakan, akan dilaksanakan pada triwulan III
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian dan UKM	150	90	60%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target triwulan

PIR. KEPALA DINAS

H. ASEP SURYA KOMARA, SEI, M. SI
NIP. 19650612 198703 1 007

Purwakarta, Juli 2023
Dimonitoring Oleh :

1. Ketua Tim
EKA SUGRIYANA, SP. MM
NIP. 19700407 199803 1 008

2. Anggota
EVI MOFYANI, SE, M. AP
NIP. 19801115 200701 2 008

3. Anggota
SUPARNI, SE
NIP. 19770120 2007012 005

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
BIDANG KOPERASI DKUPP TRIWULAN II
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM,KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL MONITORING		HASIL EVALUASI	
							REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI										
1	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Jumlah koperasi yang Sehat, dan aktif	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150	75	50,00%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target triwulan	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150	80	53,33%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target triwulan	
				Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	10	0	0%	Belum dilaksanakan, akan dilaksanakan pada triwulan III	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN										
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian dan UKM	150	90	60%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target triwulan	

PL. KEPALA DINAS

H. ASEP SURYA KOMARA, SH, M.Si
NIP. 19650612 198703 1 007

Purwakarta, Juli 2023
Dimonitoring Oleh :
1. Ketua Tim
EKA SUGRIYANA, SP. MM
NIP. 19700407 199803 1 008

2. Anggota
EVI NOPYANI, SE, M.AP
NIP. 19801115 200701 2 008

3. Anggota
SUPARNI, SE
NIP. 19770120 2007012 005

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
BIDANG UKM DEWUP TRIWULAN II
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL MONITORING		HASIL EVALUASI
							REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemandirian Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pura Peningkat Kepentingan PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	50 30 300	0 30 0	0% 100% 0%	Akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya Dilaksanakan sesuai dengan target triwulan Akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya

PIR. KEPALA DINAS

H. ASEP SURYA KOMARA, SH., M.Si
NIP. 19650612 198703 1 007

Purwakarta, Juli 2023
Dimonitoring Oleh :

1. Ketua Tim
SEA SURYATAMA, SP. MH
NIP. 19700407 199803 1 008

2. Anggota
EVI HOPTIANI, SE, MAP
NIP. 19801115 200701 2 008

3. Anggota
SUFARI, SE
NIP. 19770120 2007012 005

MONITORING DAN EVALUASI KEMANA AKSI
BIDANG PERDAGANGAN KRUPP TRIWULAN II
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen pemenuhan komitmen perolehan perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai dengan pengajuan di OSS
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Data Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai dengan pengajuan di OSS
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Peminaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	0 Unit	akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target
				Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	0 Laporan	akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya
			Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	0 Laporan	akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya

[illegible]

Pt. Kepala Dinas

H. ASEP SURYA KOMARA, SH, M. SI
NIP. 19650612 198703 1 007

Purwakarta, Juli 2023
Dimonitoring Oleh :

1. Ketua Tim
EKA SUGRIYANA, SP. MM
NIP. 19700407 199803 1 008

2. Anggota
EVI NOPIYANI, SE, M.AP
NIP. 19801115 200701 2 008

3. Anggota
SUPARNI, SE
NIP. 19770120 2007012 005

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
DKUPP TRIWULAN II
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	HASIL EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas dan produktivitas IKM	Jumlah IKM produktif	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	0 Dokumen	Akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	0 Dokumen	Akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	0 Dokumen	Akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Kegiatan sudah dilaksanakan dan 1 kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	0 Dokumen	Akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten melalui SIINas	1 Dokumen	0 Dokumen	Akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya

Pt. KEPALA DINAS

H. ASEP BURYA KOMARA, SH., M.Si
NIP. 19650612 198703 1 007

Purwakarta, Juli 2023
Dimonitoring Oleh :
1. Ketua Tim
EKA SUGRIYANA, SP. MM
NIP. 19700407 199803 1 008

2. Anggota
EVI NOFIYANI, SE., M.AP
NIP. 19801115 200701 2 008

3. Anggota
SUPARNI, SE
NIP. 19770120 2007012 005



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

Purwakarta, 27 Desember 2023

Nomor : PL.04/157/Keg/2023

Kepada

Lampiran : -

Yth. Kepala Bidang, Kasubbag

Perihal : **Evaluasi Kinerja**
Triwulan IV

dan UPTD Dilingkungan

DKUPP Kab. Purwakarta

di

Tempat

Dipermaklumkan, sehubungan dengan akan dilaksanakannya evaluasi kinerja triwulan III Tahun 2023, maka bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada kegiatan sebagaimana perihal diatas, yang akan dilaksanakan:

Hari, tanggal : Jumat, 29 Desember 2023

Pukul : 08.30 Wib s.d Selesai

Tempat : Aula Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

Catatan : 1. Data Kinerja Triwulan IV
2. Data Toko, Kios dan Los Aktif dan tidak aktif
3. Data UTTP Hasil tera Triwulan IV
4. Data Pelaku Usaha Keramik Triwulan IV
5. Data realisasi PAD Triwulan IV

Demikian kami agar maklum, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terimakasih.

Plt.KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA


EKA SUGRIYANA, S.P, M.M

Pembina Tk.I/ IV.b

NIP. 19700407 199803 1 008

DOKUMENTASI RAPAT TRIWULAN IV





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

**NOTULEN RAPAT
EVALUASI CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TRIWULAN IV**

Hari/ Tanggal : Jumat, 29 Desember 2023
Pukul : 09.00 Wib
Tempat : Aula Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Pemimpin Rapat : Kepala Dinas
Peserta Rapat :

1. Kepala Bidang Koperasi
2. Kepala Bidang UKM
3. Kepala Bidang Perdagangan
4. Kepala Bidang Perindustrian
5. Kasubbag
6. Pejabat Fungsional
7. 5 Kepala UPTD

1. Rapat dibuka oleh Kepala Dinas pukul 09.15 Wib. Agenda rapat pada kesempatan ini adalah Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan IV, Adanya penekanan Kepala Dinas mengenai Tugas dan Fungsi masing-masing individu yang wajib di penuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Mohon diingat dan dilaksanakan betul sasaran dan indikator sasaran kinerja masing-masing pegawai karena akan

dievaluasi pimpinan sejauh mana target kinerja tersebut terealisasi.

Buat time schedule atas upaya pencapaian target yang ada.

2. Dalam hal evaluasi pelaksanaan rencana kerja triwulan IV, realisasi Anggaran per 29 Desember 2023 sebesar 81.90 % dengan realisasi Kinerja Utama 99,91 %, Indikator Program 89,19 %, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan 99 %. Mohon kepada para Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional untuk meningkatkan kinerjanya kembali pada tahun kedepan. Segala permasalahan yang ada segera dikomunikasikan agar segera mendapatkan solusi dan tidak mengganggu kinerja baik individu maupun kinerja secara kelembagaan.
3. Untuk Pendapatan Asli Daerah yaitu 49 %

NOTULENSI



EVY NOPIYANI, SE

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
BIDANG KOPERASI DRUPF TRIWULAN IV
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	HASIL MONITORING		HASIL EVALUASI
								REALISASI	%	
1	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	Jumlah Koperasi yang Sehat, dan aktif	4	5	6	7	8	9	10	11
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Diawasi	Koperasi	150	150	100,00%	Sudah dilaksanakan
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Koperasi	150	150	100,00%	Sudah dilaksanakan
			Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Koperasi	10	10	100,00%	Sudah dilaksanakan
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang dilatih	Orang	150	150	100,00%	Sudah dilaksanakan

PI. KEPALA DINAS

EKA SUGRIYANA, SP. MM
NIP. 19700407 199803 1 008

Purwokarta, Desember 2023
Dinonitoring Oleh :

1. Ketua Tim
EKA SUGRIYANA, SP. MM
NIP. 19700407 199803 1 008

2. Anggota
EVI NOPTIANI, SE. MAP
NIP. 19801115 200701 2 008

3. Anggota
SUPARNI, SE
NIP. 19770120 2007012 005

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
BIDANG UKM DKUPP TRIWULAN IV
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	HASIL MONITORING		HASIL EVALUASI
								REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendidikan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Ketenagakerjaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	50	0	0%	Tidak dilaksanakan
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	30	30	100%	Sudah dilaksanakan
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	300	300	100%	Sudah dilaksanakan

PL. KEPALA DIMAS

Purwakarta, Desember 2023

Dimonitoring Oleh :

1. Ketua Tim

EKA SUGRIYANA, SP. MM

NIP. 19700407 199803 1 008

2. Anggota

EVI NOFTYANI, SE. MAP

NIP. 19801115 200701 2 008

3. Anggota

SUPARMI, SE

NIP. 19770120 2007012 005

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
BIDANG PERINDUSTRIAN DRUPP TRIWULAN IV
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	HASIL MONITORING		HASIL EVALUASI
								REALISASI	%	
1	1	Meningkatnya kualitas dan produktivitas IKM	4	5	6	7	8	9	10	11
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	100%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	0%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1	100%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	2	100%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA							
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	100%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	1	100%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten melalui SIINas	Dokumen	1	0		Kegiatan dihapus

PL. KEPALA DRUP

EKA SUGRIYANA, SP. MM
NIP. 19700407 199803 1 008

Purwakarta, Desember 2023
Dimonitoring Oleh :

1. Ketua Tim
EKA SUGRIYANA, SP. MM
NIP. 19700407 199803 1 008

2. Anggota
EVI NOPTIANI, SE, MAP
NIP. 19801115 200701 2 008

3. Anggota
SUPARNI, SE
NIP. 19770120 2007012 005



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

Purwakarta, 02 Oktober 2023

Nomor : TU.04/55/Keg/2023

Kepada

Lampiran : -

Yth. Kepala Bidang, Kasubbag

Perihal : **Evaluasi Kinerja**
Triwulan III

dan UPTD Dilingkungan

DKUPP Kab. Purwakarta

di

Tempat

Dipermaklumkan, sehubungan dengan akan dilaksanakannya evaluasi kinerja triwulan III Tahun 2023, maka bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada kegiatan sebagaimana perihal diatas, yang akan dilaksanakan:

Hari, tanggal : Rabu, 04 Oktober 2023

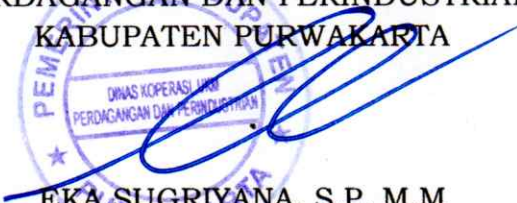
Pukul : 09.00 Wib s.d Selesai

Tempat : Aula Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta

Catatan : 1. Data Kinerja Triwulan III
2. Data Toko, Kios dan Los Aktif dan tidak aktif
3. Data UTTP Hasil tera Triwulan III
4. Data Pelaku Usaha Keramik Triwulan III
5. Data realisasi PAD Triwulan III

Demikian kami agar maklum, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terimakasih.

Plt.KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA


EKA SUGRIYANA, S.P, M.M

Pembina Tk.I/ IV.b

NIP. 19700407 199803 1 008

DAFTAR HADIR

HARI : Rabu

TANGGAL : 4 Oktober 2023

JAM :

TEMPAT : Aula Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	Imas W.L., SE	Kasubag Keu	1.....	
2.	Evi.H. SE	Perencana Ahli Madya		2.....
3.	Liunang H., SE	ARSIPARIS PRATAMA	3.....	
4.	Asep W	Pengadministrasi		4.....
5.	Elmare. S	Peraka Keuangan	5.....	
6.	Yopon. H	Pengelola Kepeg		6.....
7.	Yang Solihin	Bendahara	7.....	
8.	Enen M	Pem. Percepatan		8.....
9.	Iwan. C	Pranata Kearsipan	9.....	
10.	Adang	Pengelola Gaji		10.....
11.	Senarwo	Pengelola Kepeg	11.....	
12.	Yang Rahayu	Pranata Kebersihan		12.....
13.	Agus	— — —	13.....	
14.	Muknur W	Kabid Industri		14.....
15.	Didin Suparman	Kasi Koperasi	15.....	
16.	Ravi L., SE	Analisis Kop		16.....

	awan S		17.....	
18.	Sophan P			18.....
19.	Attano Nizar	KABID UKM	19.....	
20.	Selastri	kasi ukm		20.....
21.	Dwi H		21.....	
22.	Ummat			22.....
23.	Reana L. H		23.....	
24.	Handayani P, SE	kasi-tertib mag		24.....
25.	M. D. H		25.....	
26.	Ummu			26.....
27.	Tyus		27.....	
28.	Anna Rosnadi			28.....
29.	Taufik		29.....	
30.	Poekong A			30.....
31.	Henri I, SE, MM	Pengembangan	31.....	
32.	Hamada	Industri Kimia		32.....
33.	Dea		33.....	
34.	Eng. S			34.....
35.	Adi Agus		35.....	
36.	Bambang M	UPID pater kumayem		36.....

DOKUMENTASI RAPAT TRIWULAN III





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Jend. Ahmad Yani No.170 Telp (0264) 201064 Fax.204038 Kode Pos 41113

**NOTULEN RAPAT
EVALUASI CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TRIWULAN III**

Hari/ Tanggal : Rabu, 04 Oktober 2023
Pukul : 09.00 Wib
Tempat : Aula Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian
Pemimpin Rapat : Kepala Dinas
Peserta Rapat :

1. Kepala Bidang Koperasi
2. Kepala Bidang UKM
3. Kepala Bidang Perdagangan
4. Kepala Bidang Perindustrian
5. Kasubbag
6. Pejabat Fungsional
7. 5 Kepala UPTD

1. Rapat dibuka oleh Kepala Dinas pukul 09.15 Wib. Agenda rapat pada kesempatan ini adalah Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan III, Adanya penekanan Kepala Dinas mengenai Tugas dan Fungsi masing-masing individu yang wajib di penuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Mohon diingat dan dilaksanakan betul sasaran dan indikator sasaran kinerja masing-masing pegawai karena akan

dievaluasi pimpinan sejauh mana target kinerja tersebut terealisasi.

Buat time schedule atas upaya pencapaian target yang ada.

2. Dalam hal evaluasi pelaksanaan rencana kerja triwulan III, realisasi Anggaran per 29 September 2023 sebesar 59,07 % dengan realisasi Kinerja Utama 85.23 %, Indikator Program 77 %, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan 85,82 %. Mohon kepada para Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional untuk meningkatkan kinerjanya kembali pada triwulan IV kedepan. Segala permasalahan yang ada segera dikomunikasikan agar segera mendapatkan solusi dan tidak mengganggu kinerja baik individu maupun kinerja secara kelembagaan.
3. Untuk Pendapatan Asli Daerah yaitu 49 %

NOTULENSI


EVI NOPIYANI, SE

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
BIDANG KOPERASI DRUPP TRIWULAN III
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	HASIL MONITORING		HASIL EVALUASI
								REALISASI	%	
1	1	Mewujudkan Koperasi yang Sehat dan Aktif	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI										
		Jumlah koperasi yang Sehat dan aktif	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketanggungan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Diawasi	Koperasi	150	115	76,67%	Realisasi sesuai dengan rencana aksi kinerja
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI										
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Koperasi	150	115	76,67%	Realisasi sesuai dengan rencana aksi kinerja
				Pengaruh Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Koperasi	10	10	100,00%	Sudah dilaksanakan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN										
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang dilatih	Orang	150	150	100,00%	Sudah dilaksanakan

Pt. KEPALA DRAS

EKA SUGRIYANA, SP. MM
NIP. 19700407 199803 1 008

Purwakarta, Oktober 2023
Dimonitoring Oleh :

1. Ketua Tim
EKA SUGRIYANA, SP. MM
NIP. 19700407 199803 1 008

2. Anggota
EVI NOPTYANI, SE, MAP
NIP. 19801115 200701 2 008

3. Anggota
SUPARNO, SE
NIP. 19770120 2007012 005

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
BIDANG UKM DKUPP TRIWULAN III
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	HASIL MONITORING		HASIL EVALUASI
								REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Tangguh	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha Unit Usaha Unit Usaha	50 30 300	0 30 121	0% 100% 40%	Alasan dilaksanakan pada triwulan berikutnya Dilaksanakan sesuai dengan target triwulan Dilaksanakan sesuai dengan target triwulan

PIR. KEPALA DINAS

EKA SUGRIYANA, SP. MM
NIP. 19700407 199803 1 008

Purwakarta, Oktober 2023

Dimonitoring Oleh :

1. Ketua Tim
EKA SUGRIYANA, SP. MM
NIP. 19700407 199803 1 008

2. Anggota
EVI MOFYANI, SE. M.AP
NIP. 19801115 200701 2 008

3. Anggota
SUPARNI, SE
NIP. 19770120 2007012 005

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
BIDANG PEDAGANGAN KRUPP TRIWULAN III
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	HASIL MONITORING		HASIL EVALUASI
								REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terciptanya kelancaran jalur distribusi barang	Jumlah komoditi barang yang di distribusikan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Bertusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen pemenuhan komitmen perolehan perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Dokumen	1	1	100%	Sesuai dengan pengajuan di OSS
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Data Tanda Daftar Gudang	Dokumen	1	1	100%	Sesuai dengan pengajuan di OSS
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PEDAGANGAN							
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	0	0%	Kegiatan ditunda
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	1	100%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	1	100%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	1	1	100%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	1	1	100%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Kabupaten/ Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	1	1	100%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
BIDANG PERINDUSTRIAN DKUPP TRIWULAN III
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	HASIL MONITORING		HASIL EVALUASI
								REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas dan produktivitas IKM	Jumlah IKM produktif	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	100%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	0	0%	Akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	1	100%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	2	100%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA							
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%	Sudah dilaksanakan sesuai dengan target

Tunjangan Diberikan
26 November 2023 s/d 20 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Besaran TPP (100%)	Besaran TPP (60%)	Besaran TPP (40%)	PUK (60%)	PUD (40%)	Jumlah yang diberikan	Keterangan
1	AHMAD NIZAR, S.Pd, M.Si	KEPALA BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp. 11,288,400,-	Rp. 6,773,040,-	Rp. 4,515,360,-	Rp. 1,151,417,-	Rp. 3,476,827,-	Rp. 6,660,156,-	TAM: 0x TAP: 0x TK: 14x TL: 0.00% PSW: 0.00% TB: 2x IKK: 9x
TOTAL								Rp. 6,660,156,-	

Catatan:

1. TK = Tanpa Keterangan (4%)
2. TB = Tidak Berkinerja: (4%)
3. TL = Terlambat
4. PSW = Pulang Sebelum Waktunya
5. ATL = Absen Tidak Lengkap
6. IKK = Input Kinerja Kurang

Absensi

No	Tanggal	Kehadiran	PUD (%)	PUD (Rp)	Keterangan
1	26 November 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
2	27 November 2023 06:30:00	Dihadirkan Masuk	0.00	Rp. 0,-	DL SP NOMOR : KPG.11.01/1610/UKM/2023
3	27 November 2023 16:20:00	Dihadirkan Pulang	0.00	Rp. 0,-	DL SP NOMOR : KPG.11.01/1610/UKM/2023
4	28 November 2023 16:20:00	Dihadirkan Pulang	0.00	Rp. 0,-	DL SP NOMOR : KPG.11.01/1610/UKM/2023
5	28 November 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
6	29 November 2023 06:30:00	Dihadirkan Masuk	0.00	Rp. 0,-	DL SP NOMOR : KPG.11.01/1568/UKM/2023
7	29 November 2023 18:36:28	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
8	30 November 2023 06:30:00	Dihadirkan Masuk	0.00	Rp. 0,-	DL SP NOMOR : KPG.11.01/1568/UKM/2023
9	30 November 2023 16:20:00	Dihadirkan Pulang	0.00	Rp. 0,-	DL SP NOMOR : KPG.11.01/1568/UKM/2023

No	Tanggal	Kehadiran	PUD (%)	PUD (Rp)	Keterangan
10	01 Desember 2023 16:20:00	Dihadirkan Pulang	0.00	Rp. 0,-	DL SP NOMOR : KPG.11.01/1610/UKM/2023
11	01 Desember 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
12	02 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
13	03 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
14	04 Desember 2023 16:34:20	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
15	04 Desember 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
16	05 Desember 2023 18:50:50	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
17	05 Desember 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
18	06 Desember 2023 17:09:57	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
19	06 Desember 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
20	07 Desember 2023 18:28:19	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
21	07 Desember 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
22	08 Desember 2023 16:42:32	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
23	08 Desember 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
24	09 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
25	10 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
26	11 Desember 2023 18:25:41	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
27	11 Desember 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
28	12 Desember 2023 16:13:02	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
29	12 Desember 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
30	13 Desember 2023 21:31:21	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-

No	Tanggal	Kehadiran	PUD (%)	PUD (Rp)	Keterangan
31	13 Desember 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
32	14 Desember 2023 16:51:55	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
33	14 Desember 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
34	15 Desember 2023 20:40:04	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
35	15 Desember 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
36	16 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
37	17 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
38	18 Desember 2023 17:09:03	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
39	18 Desember 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
40	19 Desember 2023 16:20:00	Dihadirkan Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
41	19 Desember 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
42	20 Desember 2023 06:00:00	Cuti	0.00	Rp. 0,-	Cuti Sakit SKD Nomor : 1320/Klinik Pratama AQMA PLERED

Kinerja

No	Tanggal	Status ACC	Status Belum ACC	Status Tidak ACC
1	26 November 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
2	27 November 2023	4	0	0
3	28 November 2023	4	0	0
4	29 November 2023	3	0	0
5	30 November 2023	4	0	0
6	01 Desember 2023	4	0	0
7	02 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
8	03 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
9	04 Desember 2023	4	0	0
10	05 Desember 2023	3	0	0
11	06 Desember 2023	4	0	0

No	Tanggal	Status ACC	Status Belum ACC	Status Tidak ACC
12	07 Desember 2023	3	0	0
13	08 Desember 2023	3	0	0
14	09 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
15	10 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
16	11 Desember 2023	3	0	0
17	12 Desember 2023	4	0	0
18	13 Desember 2023	3	0	0
19	14 Desember 2023	3	0	0
20	15 Desember 2023	3	0	0
21	16 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
22	17 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
23	18 Desember 2023	3	0	0
24	19 Desember 2023	Tidak Berkinerja	Tidak Berkinerja	Tidak Berkinerja
25	20 Desember 2023	Cuti	Cuti	Cuti

Tidak Mengikuti Upacara

Catatan OPD dari Pengawas Eksternal

No	Tanggal	PUD	No	Tanggal	Catatan
----	---------	-----	----	---------	---------

Atasan,

EKA SUGRIYANA, SP, MM
NIP. 197004071998031008

Purwakarta, 21 Desember 2023

AHMAD NIZAR, S.Pd, M.Si
NIP. 196607281998021002

Tunjangan Diberikan
26 November 2023 s/d 20 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Besaran TPP (100%)	Besaran TPP (60%)	Besaran TPP (40%)	PUK (60%)	PUD (40%)	Jumlah yang diberikan	Keterangan
			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	TAM: 0x TAP: 1x TK: 7x TL: 6.50% PSW: 0.00% TB: 6x IKK: 0x
1	BAMBANG KOSWARA	FASILITATOR PERDAGANGAN	4,272,000,-	2,563,200,-	1,708,800,-	615,168,-	794,592,-	2,862,240,-	
TOTAL								Rp. 2,862,240,-	

Catatan:

1. TK = Tanpa Keterangan (4%)
2. TB = Tidak Berkinerja: (4%)
3. TL = Terlambat
4. PSW = Pulang Sebelum Waktunya
5. ATL = Absen Tidak Lengkap
6. IKK = Input Kinerja Kurang

Absensi

No	Tanggal	Kehadiran	PUD (%)	PUD (Rp)	Keterangan
1	26 November 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
2	27 November 2023 16:34:11	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
3	27 November 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
4	28 November 2023 10:55:39	Masuk	1.50	Rp. 25,632,-	-
5	28 November 2023 16:20:00	Dihadirkan Pulang	0.00	Rp. 0,-	Mati Listrik
6	29 November 2023 06:30:00	Dihadirkan Masuk	0.00	Rp. 0,-	HUT KORPRI
7	29 November 2023 20:03:08	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
8	30 November 2023 17:37:20	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
9	30 November 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-

No	Tanggal	Kehadiran	PUD (%)	PUD (Rp)	Keterangan
10	01 Desember 2023 17:51:14	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
11	01 Desember 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
12	02 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
13	03 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
14	04 Desember 2023 06:47:54	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
15	04 Desember 2023 17:20:36	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
16	05 Desember 2023 15:47:34	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
17	05 Desember 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
18	06 Desember 2023 06:13:11	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
19	06 Desember 2023 22:22:52	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
20	07 Desember 2023 06:30:00	Dihadirkan Masuk	0.00	Rp. 0,-	DL SP Nomor : KPG.11.01/1688/SEKRE/2023
21	07 Desember 2023 18:25:27	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
22	08 Desember 2023 10:59:26	Masuk	1.50	Rp. 25,632,-	-
23	08 Desember 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
24	09 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
25	10 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
26	11 Desember 2023 17:24:46	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
27	11 Desember 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
28	12 Desember 2023 11:03:53	Masuk	1.50	Rp. 25,632,-	-
29	12 Desember 2023 17:37:20	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
30	13 Desember 2023 07:28:44	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-

No	Tanggal	Kehadiran	PUD (%)	PUD (Rp)	Keterangan
31	13 Desember 2023 16:33:24	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
32	14 Desember 2023 16:14:21	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
33	14 Desember 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-
34	15 Desember 2023 06:30:00	Dihadirkan Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
35	15 Desember 2023 16:33:32	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
36	16 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
37	17 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
38	18 Desember 2023 11:00:53	Masuk	1.50	Rp. 25,632,-	-
39	18 Desember 2023 21:33:55	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
40	19 Desember 2023 07:45:18	Masuk	0.50	Rp. 8,544,-	-
41	19 Desember 2023 18:33:13	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
42	20 Desember 2023 18:40:50	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
43	20 Desember 2023 00:00:00	Tidak Absen	-	Rp. 0,-	-

Kinerja

No	Tanggal	Status ACC	Status Belum ACC	Status Tidak ACC
1	26 November 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
2	27 November 2023	Tidak Berkinerja	Tidak Berkinerja	Tidak Berkinerja
3	28 November 2023	4	0	0
4	29 November 2023	4	0	0
5	30 November 2023	Tidak Berkinerja	Tidak Berkinerja	Tidak Berkinerja
6	01 Desember 2023	4	0	0
7	02 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
8	03 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
9	04 Desember 2023	4	0	0

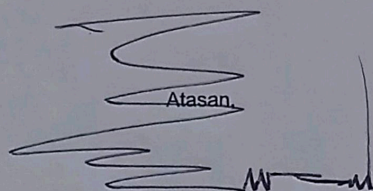
No	Tanggal	Status ACC	Status Belum ACC	Status Tidak ACC
10	05 Desember 2023	Tidak Berkinerja	Tidak Berkinerja	Tidak Berkinerja
11	06 Desember 2023	4	0	0
12	07 Desember 2023	4	0	0
13	08 Desember 2023	Tidak Berkinerja	Tidak Berkinerja	Tidak Berkinerja
14	09 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
15	10 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
16	11 Desember 2023	Tidak Berkinerja	Tidak Berkinerja	Tidak Berkinerja
17	12 Desember 2023	4	0	0
18	13 Desember 2023	4	0	0
19	14 Desember 2023	Tidak Berkinerja	Tidak Berkinerja	Tidak Berkinerja
20	15 Desember 2023	4	0	0
21	16 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
22	17 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
23	18 Desember 2023	4	0	0
24	19 Desember 2023	4	0	0
25	20 Desember 2023	4	0	0

Tidak Mengikuti Upacara

Catatan OPD dari Pengawas Eksternal

No Tanggal PUD

No Tanggal Catatan



H.IWAN MUSTAWA, SE., M.Si
NIP. 196710101995031005

Purwakarta, 21 Desember 2023

BAMBANG KOSWARA
NIP. 197707242014121002

Tunjangan Diberikan
26 November 2023 s/d 20 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Besaran TPP (100%)	Besaran TPP (60%)	Besaran TPP (40%)	PUK (60%)	PUD (40%)	Jumlah yang diberikan	Keterangan
1	DRS.MAKMUR WAHIDIN,M.M	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	Rp. 11,288,400,-	Rp. 6,773,040,-	Rp. 4,515,360,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 11,288,400,-	TAM: 0x TAP: 0x TK: 0x TL: 0.00% PSW: 0.00% TB: 0x IKK: 0x
TOTAL								Rp. 11,288,400,-	

Catatan:

1. TK = Tanpa Keterangan (4%)
2. TB = Tidak Berkinerja: (4%)
3. TL = Terlambat
4. PSW = Pulang Sebelum Waktunya
5. ATL = Absen Tidak Lengkap
6. IKK = Input Kinerja Kurang

Absensi

No	Tanggal	Kehadiran	PUD (%)	PUD (Rp)	Keterangan
1	26 November 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
2	27 November 2023 06:35:38	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
3	27 November 2023 16:20:00	Dihadirkan Pulang	0.00	Rp. 0,-	SP. Nomor : 10989/TU.04/Skrt.
4	28 November 2023 06:30:00	Dihadirkan Masuk	0.00	Rp. 0,-	DL SP NOMOR : KPG.11.01/1619/SEKRE/2023
5	28 November 2023 16:20:00	Dihadirkan Pulang	0.00	Rp. 0,-	Mati Listrik
6	29 November 2023 06:30:00	Dihadirkan Masuk	0.00	Rp. 0,-	HUT KORPRI
7	29 November 2023 17:05:00	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
8	30 November 2023 07:15:34	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
9	30 November 2023 15:45:56	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
10	01 Desember 2023 06:45:29	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
11	01 Desember 2023 16:16:51	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
12	02 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
13	03 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
14	04 Desember 2023 07:15:01	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
15	04 Desember 2023 15:45:34	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
16	05 Desember 2023 07:14:06	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
17	05 Desember 2023 15:45:42	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
18	06 Desember 2023 07:10:40	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
19	06 Desember 2023 15:45:13	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
20	07 Desember 2023 07:01:51	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
21	07 Desember 2023 15:49:11	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
22	08 Desember 2023 07:22:27	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-

No	Tanggal	Kehadiran	PUD (%)	PUD (Rp)	Keterangan
23	08 Desember 2023 16:59:46	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
24	09 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
25	10 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
26	11 Desember 2023 07:12:39	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
27	11 Desember 2023 16:09:53	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
28	12 Desember 2023 05:33:08	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
29	12 Desember 2023 16:00:19	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
30	13 Desember 2023 05:43:58	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
31	13 Desember 2023 16:05:35	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
32	14 Desember 2023 07:25:10	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
33	14 Desember 2023 15:53:52	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
34	15 Desember 2023 07:24:29	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
35	15 Desember 2023 17:10:34	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
36	16 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
37	17 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
38	18 Desember 2023 06:56:36	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
39	18 Desember 2023 15:46:18	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
40	19 Desember 2023 05:44:56	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
41	19 Desember 2023 15:49:08	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
42	20 Desember 2023 05:46:30	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
43	20 Desember 2023 16:13:29	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-

Kinerja

No	Tanggal	Status ACC	Status Belum ACC	Status Tidak ACC
1	26 November 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
2	27 November 2023	4	0	0
3	28 November 2023	4	0	0
4	29 November 2023	4	0	0
5	30 November 2023	4	0	0
6	01 Desember 2023	4	0	0
7	02 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
8	03 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
9	04 Desember 2023	4	0	0
10	05 Desember 2023	5	0	0
11	06 Desember 2023	4	0	0
12	07 Desember 2023	4	0	0
13	08 Desember 2023	4	0	0
14	09 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
15	10 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur

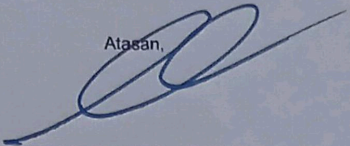
No	Tanggal	Status ACC	Status Belum ACC	Status Tidak ACC
16	11 Desember 2023	4	0	0
17	12 Desember 2023	4	0	0
18	13 Desember 2023	4	0	0
19	14 Desember 2023	4	0	0
20	15 Desember 2023	4	0	0
21	16 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
22	17 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
23	18 Desember 2023	5	0	0
24	19 Desember 2023	4	0	0
25	20 Desember 2023	4	0	0

Tidak Mengikuti Upacara

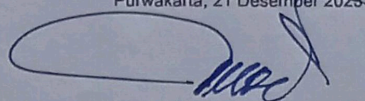
Catatan OPD dari Pengawas Eksternal

No	Tanggal	PUD	No	Tanggal	Catatan
----	---------	-----	----	---------	---------

Atasan,


EKA SUGRIYANA, SP, MM
NIP. 197004071998031008

Purwakarta, 21 Desember 2023


DRS. MAKMUR WAHIDIN, M.M
NIP. 196611051994031007

Tunjangan Diberikan
26 November 2023 s/d 20 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Besaran TPP (100%)	Besaran TPP (60%)	Besaran TPP (40%)	PUK (60%)	PUD (40%)	Jumlah yang diberikan	Keterangan
1	EKA SUGRIYANA,SP, MM	SEKRETARIS DINAS KUKMPERDAGIN	Rp. 12,351,600,-	Rp. 7,410,960,-	Rp. 4,940,640,-	Rp. 0,-	Rp. 24,703,-	Rp. 12,326,897,-	TAM: 0x TAP: 0x TK: 0x TL: 0.50% PSW: 0.00% TB: 0x IKK: 0x
TOTAL								Rp. 12,326,897,-	

Catatan:

1. TK = Tanpa Keterangan (4%)
2. TB = Tidak Berkinerja: (4%)
3. TL = Terlambat
4. PSW = Pulang Sebelum Waktunya
5. ATL = Absen Tidak Lengkap
6. IKK = Input Kinerja Kurang

Absensi

No	Tanggal	Kehadiran	PUD (%)	PUD (Rp)	Keterangan
1	26 November 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
2	27 November 2023 06:30:00	Dihadirkan Masuk	0.00	Rp. 0,-	DL
3	27 November 2023 16:12:15	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
4	28 November 2023 07:18:46	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
5	28 November 2023 16:20:00	Dihadirkan Pulang	0.00	Rp. 0,-	Mati Listrik
6	29 November 2023 06:30:00	Dihadirkan Masuk	0.00	Rp. 0,-	HUT KORPRI
7	29 November 2023 16:20:00	Dihadirkan Pulang	0.00	Rp. 0,-	DL SEMARANG
8	30 November 2023 06:30:00	Dihadirkan Masuk	0.00	Rp. 0,-	DL SEMARANG
9	30 November 2023 16:20:00	Dihadirkan Pulang	0.00	Rp. 0,-	DL SEMARANG
10	01 Desember 2023 07:36:03	Masuk	0.50	Rp. 24,703,-	-
11	01 Desember 2023 16:28:00	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
12	02 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
13	03 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
14	04 Desember 2023 06:30:00	Dihadirkan Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
15	04 Desember 2023 16:38:58	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
16	05 Desember 2023 07:27:04	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-

No	Tanggal	Kehadiran	PUD (%)	PUD (Rp)	Keterangan
17	05 Desember 2023 16:19:38	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
18	06 Desember 2023 07:22:55	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
19	06 Desember 2023 16:25:42	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
20	07 Desember 2023 07:13:52	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
21	07 Desember 2023 16:03:57	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
22	08 Desember 2023 07:27:40	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
23	08 Desember 2023 16:20:00	Dihadirkan Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
24	09 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
25	10 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
26	11 Desember 2023 07:16:18	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
27	11 Desember 2023 16:53:19	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
28	12 Desember 2023 07:29:50	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
29	12 Desember 2023 16:20:00	Dihadirkan Pulang	0.00	Rp. 0,-	DL
30	13 Desember 2023 06:30:00	Dihadirkan Masuk	0.00	Rp. 0,-	DL
31	13 Desember 2023 16:20:00	Dihadirkan Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
32	14 Desember 2023 06:36:56	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
33	14 Desember 2023 17:00:13	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
34	15 Desember 2023 06:40:20	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
35	15 Desember 2023 17:34:44	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
36	16 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
37	17 Desember 2023 00:00:00	Hari Libur	-	Rp. 0,-	-
38	18 Desember 2023 07:13:32	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
39	18 Desember 2023 16:28:56	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
40	19 Desember 2023 07:19:23	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
41	19 Desember 2023 16:44:22	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-
42	20 Desember 2023 07:27:09	Masuk	0.00	Rp. 0,-	-
43	20 Desember 2023 16:05:44	Pulang	0.00	Rp. 0,-	-

Kinerja

No	Tanggal	Status ACC	Status Belum ACC	Status Tidak ACC
1	26 November 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
2	27 November 2023	6	0	0
3	28 November 2023	5	0	0
4	29 November 2023	5	0	0

No	Tanggal	Status ACC	Status Belum ACC	Status Tidak ACC
5	30 November 2023	5	0	0
6	01 Desember 2023	6	0	0
7	02 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
8	03 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
9	04 Desember 2023	6	0	0
10	05 Desember 2023	6	0	0
11	06 Desember 2023	6	0	0
12	07 Desember 2023	4	0	0
13	08 Desember 2023	4	0	0
14	09 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
15	10 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
16	11 Desember 2023	6	0	0
17	12 Desember 2023	4	0	0
18	13 Desember 2023	4	0	0
19	14 Desember 2023	5	0	0
20	15 Desember 2023	7	0	0
21	16 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
22	17 Desember 2023	Hari Libur	Hari Libur	Hari Libur
23	18 Desember 2023	6	0	0
24	19 Desember 2023	6	0	0
25	20 Desember 2023	6	0	0

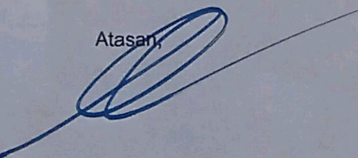
Tidak Mengikuti Upacara

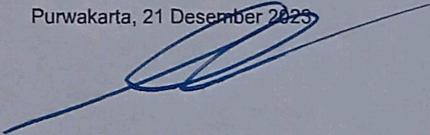
Catatan OPD dari Pengawas Eksternal

No	Tanggal	PUD	No	Tanggal	Catatan
----	---------	-----	----	---------	---------

Atasan,

Purwakarta, 21 Desember 2023


EKA SUGRIYANA, SP, MM
 NIP. 197004071998031008


EKA SUGRIYANA, SP, MM
 NIP. 197004071998031008

2024

RENCANA KERJA



**DINAS KOPERASI, UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 telah selesai dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

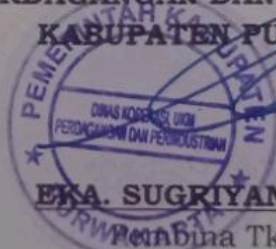
Renja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2024. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, memuat diantaranya tujuan, sasaran serta target capaian kinerja yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua unit kerja berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 secara konsisten. Selanjutnya, diharapkan dengan adanya dokumen Renja ini dapat mendeskripsikan kondisi aktual dan akselerasi pencapaian kinerja di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

Demikian, semoga dokumen Renja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini dapat Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Perekonomian Masyarakat.

Purwakarta, 30 Juli 2024

**Plt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



EKA. SUGRIYANA, S.P., M.M

Penyusunan Tk.I/ IV.b

NIP. 19700407 199803 1 008

2025

RENCANA KERJA

LAPORAN BY:
BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

**DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 telah selesai dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Renja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, memuat diantaranya tujuan, sasaran serta target capaian kinerja yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua unit kerja berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025s secara konsisten. Selanjutnya, diharapkan dengan adanya dokumen Renja ini dapat mendeskripsikan kondisi aktual dan akselerasi pencapaian kinerja di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.

Demikian, semoga dokumen Renja Dinas Koperasi, UKM,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta Tahun
2025 ini dapat Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing
Perekonomian Masyarakat.

Purwakarta, 30 Juli 2024

Pt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PURWAKARTA



NIP. 19710713 199901 1 001